

# Civil Implications of Studying Political Science:

Comparative Study of Students  
in Religion, Law, Communication,  
and Political Sciences  
at the State Islamic University



Dr. Ija Suntana, M.Ag  
Dr. Betty Tresnawaty, S.Sos., M.I.Kom

*Pusat Penelitian dan Penerbitan  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

**Civil Implications of Studying  
Political Science:  
Comparative Study of Students  
in Religion, Law,  
Communication,  
and Political Sciences at the  
State Islamic University**

LAPORAN PENELITIAN

**Dr. Ija Suntana, M.Ag**

**Dr. Betty Tresnawaty, S.Sos., M.I.Kom.**

Pusat Penelitian dan Penerbitan  
UIN SGD Bandung

2019

## KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sebagai hasil penelitian kami tentang pemahaman politik mahasiswa tiga universitas Islam yang mempengaruhi sikap berpolitik mereka. Melalui laporan ini kami berupaya untuk menggambarkan hasil survei dan analisis pemahaman sikap berpolitik mereka dari hasil pembelajaran mata kuliah politik dalam perkuliahan.

Sistematika buku ini disusun secara perbab, di mana pada setiap bab dimuat sejumlah materi. Pada Bab I dimuat panduan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari hasil penelitian kami. Pada Bab II diulas tentang telaah teori dan kajian pustaka yang menjadi rujukan kami dalam menganalisa hasil penelitian ini. Pada Bab III dibahas tentang hasil penelitian analisis dan pembahasannya. Sedangkan, pada Bab IV adalah bagian penutup.

Sudah barang tentu buku panduan ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan. Sehubungan dengan itu, masih terbuka masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku panduan ini kami sampaikan terima kasih. Semoga berbagai kontribusi yang diberikan menjadi kebaikan dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Bandung, 4 Oktober 2019

Penulis,

## ***ABSTRACT***

This research examines the civil implications of studying political science for students in science, law, communication, and politics. Several previous studies have shown that political learning has very strong civil implications on the behavior of political science students. Survey results through online polls and direct interviews at three state Islamic universities in Indonesia show reverse data, namely studying political science has a positive effect on attitudes of law students towards political issues compared to political science students. The survey results showed that Islamic science students were more affected by their political knowledge than communication students as well. This study concludes that there is no reason to privilege the specific objectives of political science education in certain students, because it is not just knowledge that shapes political attitudes and behavior but environmental factors and others participate in shaping it.

**Keywords:** politics; social implications; environmental factor

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah implikasi sipil dari mempelajari ilmu politik bagi mahasiswa program studi ilmu, hukum, komunikasi, dan politik. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran politik memiliki implikasi sipil yang sangat kuat pada perilaku mahasiswa ilmu politik. Hasil survei melalui polling online dan wawancara langsung di tiga universitas Islam negeri di Indonesia menunjukkan data kebalikan, yaitu mempelajari ilmu politik memiliki efek positif pada sikap mahasiswa hukum terhadap isu-isu politik dibanding mahasiswa ilmu politik. Hasil survei pun menunjukkan bahwa mahasiswa ilmu keislaman lebih terpengaruh oleh pengetahuan politik mereka daripada mahasiswa komunikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk mengistimewakan tujuan khusus pendidikan Ilmu politik pada mahasiswa tertentu, karena bukan sekadar pengetahuan yang membentuk sikap dan perilaku politik melainkan faktor lingkungan dan lainnya ikut serta membentuknya.

Kata Kunci: politik; implikasi sosial; faktor lingkungan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
ABSTRACT.....	3
ABSTRAK.....	4
Daftar ISI .....	5
BAB I	
PENDAHULUAN.....	6
BAB II	
TELAAH TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	13
BAB III	
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	60
BAB IV	
PENUTUP .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Orang-orang berpendidikan tinggi diduga memiliki perhatian lebih pada urusan-urusan publik dan memiliki tingkat kedewasaan sikap dalam memahami berbagai gejala dan realita. Pendidikan tinggi yang mereka alami merupakan faktor yang kuat dalam membentuk wawasan dan sikap sosial (Steiner, 1990).

Pengetahuan politik yang dipelajari oleh para mahasiswa di sebuah perguruan tinggi diduga berpengaruh terhadap sikap dan wawasan mereka terhadap setiap hal yang berhubungan dengan dimensi politik dan realitas yang terkait dengannya. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa peneliti yang menyimpulkan bahwa ilmu politik yang dipelajari oleh mahasiswa membentuk persepsi negatif mereka terhadap setiap hal yang terkait politik (Langton and Kent, 1988).

Mahasiswa yang sangat dekat dengan politik adalah mereka yang berada di program studi ilmu politik. Diduga banyak peneliti bahwa mereka terpengaruh secara positif oleh ilmu yang dipelajarinya dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa di program studi lainnya. Terdapat juga program studi yang beririsan dengan ilmu politik, yaitu program studi hukum, mereka cukup dekat politik walaupun tidak sedekat mahasiswa program studi ilmu politik. Sementara itu, mahasiswa komunikasi dan ilmu agama secara kurikulum tidak dekat

dengan politik sebagai sains, karena muatan pengetahuan formal mereka di bidang politik sangat minim.

Secara realita, banyak orang-orang berkecimpung di sektor politik yang latar belakang akademiknya tidak memiliki hubungan langsung dengan politik. Realitas sosial tersebut memerlukan konfirmasi apakah pengetahuan politik memiliki hubungan erat dengan hasrat pada dunia politik.

Universitas Islam Negeri di Indonesia merupakan sistem pendidikan tinggi dengan distingsi tertentu. Diperkirakan terdapat perbedaan yang tampak di antara peserta didik yang mendalami ilmu politik, ilmu agama, hukum, dan komunikasi terkait sikap dan ketertarikan mereka terhadap politik sebagai realita. Untuk memotret data yang sebenarnya perlu diangkat dalam sebuah tema penelitian yang relevan, dalam hal ini tentang implikasi civil dari pengetahuan politik yang dipelajari oleh para mahasiswa dengan beragam latar belakang disiplin ilmu.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas terdapat sejumlah masalah penelitian yang terumuskan, yaitu (1) pengetahuan politik yang dipelajari di perguruan Universitas Islam Negeri, (2) hubungan pengetahuan politik dengan sikap dan pandangan mahasiswa terhadap realita politik, (3) tingkat pengetahuan politik pada beragam program studi di Universitas Islam Negeri, (4) sikap dan persepsi mahasiswa terhadap dimensi-dimensi politik.

### **Pertanyaan Penelitian**



Berdasarkan rumusan masalah di atas dirumuskan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pengetahuan politik yang dipelajari di Universitas Islam Negeri?
2. Bagaimana hubungan pengetahuan politik dengan sikap dan pandangan mahasiswa terhadap realita politik?
3. Bagaimana perbedaan tingkat pengetahuan politik di kalangan mahasiswa di Universitas Islam Negeri?
4. Apakah pengetahuan politik yang dipelajari berpengaruh terhadap tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap fenomena dan realita politik?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada penelitian di atas, yaitu:

1. Mendeskripsikan tentang pengetahuan politik yang dipelajari oleh mahasiswa di Universitas Islam Negeri.
2. Mendeskripsikan hubungan pengetahuan politik dengan sikap dan pandangan mahasiswa terhadap realitas politik?
3. Mendeskripsikan perbedaan tingkat pengetahuan politik di kalangan mahasiswa di Universitas Islam Negeri.
4. Mendeskripsikan pengaruh pengetahuan politik yang dipelajari terhadap tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap fenomena dan realita politik.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengonfirmasi sejumlah teori yang berhubungan dengan dampak sipil dari pembelajaran ilmu

politik di perguruan tinggi terhadap sikap mahasiswa pada fenomena politik dan dimensi-dimensi lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah pengembangan pendidikan tinggi pada sektor pengembangan minat mahasiswa pada sektor-sektor publik di masyarakat.

## **Metode Penelitian**

### **A. Desain Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam bentuk *content analysis*, yaitu mendeskripsikan pandangan mahasiswa ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu informasi di tiga Universitas Islam Negeri di Indonesia tentang hubungan ilmu politik yang mereka pelajari dengan perilaku dan sikap mereka pada gejala politik. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods*, yaitu menggabungkan pembacaan data secara kuantitatif (dalam bentuk *bibliometrix analysis*) dan kualitatif (dalam bentuk analisis deskriptif).

Populasi penelitian adalah mahasiswa jurusan ilmu keislaman, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu komunikasi di UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Yogyakarta, dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Penentuan jumlah sampel menggunakan *rumus slovin*, yaitu sebuah **rumus** atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal dalam sebuah penelitian, dengan rumus sebagai berikut:

$$n = N / ( 1 + N.(e)^2)$$

**Keterangan :**

n = Jumlah sampel

N = Jumlah total populasi

e = Batas toleransi error (*margin error*)

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui polling online, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan pilihan ganda melalui jaringan maya (internet), dan wawancara langsung dalam bentuk focus group discussion (FGD). Adapun wawancara digunakan untuk pendalaman informasi dari para responden dengan fokus materi pada lima hal, (1) pemahaman politik, (2) realita politik di masyarakat, (3) pemahaman demokrasi, (4) ketaatan pada negara, (5) hubungan agama dengan politik.

Adapun materi pertanyaan dalam bentuk polling online diarahkan untuk mencari jawaban dalam bentuk persentase sekitar masalah minat pada politik, perlu tidaknya politik, dan respon terhadap gejala politik. Ada tiga alasan polling online dipilih sebagai teknik pengumpulan data. *Pertama*, persoalan penelitian ini dapat dilaksanakan melalui polling online. *Kedua*, polling online lebih mudah menjangkau responden yang dituju dan memiliki tingkat efisiensi material. *Ketiga*, polling online dapat langsung membaca persentase respon (*feedback*) dari para responden secara elektronik.

## **C. Instrumen Data**

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah angket pertanyaan dengan 5 kelompok pertanyaan dan 15 pilihan jawaban. Angket dibuat dalam bentuk elektronik dengan menggunakan fasilitas Open Access Digital Research (OPDR) yang

dikembangkan oleh Pusat Perpustakaan UIN Bandung. Instrumen elektronik ini digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data penelitian secara sistematis dan objektif.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu (1) data primer, yaitu hasil polling dan wawancara dengan mahasiswa jurusan Ilmu Keislaman, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, dan Ilmu Komunikasi di UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Yogyakarta; 2) data sekunder, yaitu bahan pustaka yang memiliki hubungan materi dengan objek yang diteliti namun tidak terkait langsung.

Pada dasarnya seluruh data merupakan sumber primer dalam penelitian ini, sebab kesemuanya membentuk kelengkapan penelitian. Pemilahan data kepada primer dan sekunder hanya dilihat dari intensitas, kadar pengutipan, dan penggunaan dalam penulisan penelitian, tidak terkait dengan kualitas data yang ditemukan. Mungkin saja terdapat data penting (primer) dalam sejumlah referensi yang diidentifikasi sebagai data sekunder. Sehubungan dengan itu, pemilahan primer dan sekunder di dalam penelitian hanya terkait dengan kuantitas, tidak terkait langsung dengan kualitas data yang ditemukan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan cara melihat materi dan jumlah dokumentasi hasil polling dan wawancara, serta membandingkan hasil-hasil wawancara dengan

mahasiswa di tiga Universitas Islam Negeri, yaitu UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Jogjakarta.

Analisis secara kuantitatif digunakan untuk membaca hasil angket untuk diolah menjadi data tersaji. Adapun analisis kualitatif dilakukan dengan spesifikasi analisis eksplanatoris, yaitu penelaahan dilakukan secara kritis yang bersifat dekonstruktif atas bahan yang dijadikan objek penelitian.

#### **E. Point Pengembangan Pendidikan Tinggi**

- a. Pengembangan materi politik pada kurikulum setiap prodi, tidak sekadar di program studi ilmu politik.
- b. Pengembangan *political entrepreneurship* pada berbagai prodi
- c. Pengembangan konsep pekerjaan lulusan secara lebih luas, tidak sekadar dikembangkan pada sektor tertentu yang linear dengan disiplin pengetahuan yang dipelajari.

## **Bab II**

### **TELAAH TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Relasi Pengetahuan dan Perilaku**

Perdebatan tentang pengetahuan dan perilaku terus berlanjut. Teori perilaku terencana (*theory of planned behaviour*) menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, bukan oleh pengetahuan. Menurut teori ini ada indikasi bahwa faktor lokal konteks-spesifik memiliki pengaruh yang lebih besar pada preferensi perilaku dibanding pengetahuan yang dipelajari.<sup>1</sup> Senada dengan teori perilaku terencana, teori *epigenetic rules* menyebutkan bahwa perilaku dibentuk secara terprogram oleh faktor genetis, bukan oleh pengetahuan. Faktor genetik tersebut memengaruhi pilihan manusia untuk melakukan atau meninggalkan tindakan tertentu.<sup>2</sup>

Lain halnya dengan teori sosiopsikologis yang menyatakan bahwa proses sosial membentuk karakter, perilaku, dan bahkan tingkat kekayaan seseorang.<sup>3</sup> Beberapa komponen dalam diri manusia dibentuk secara perlahan namun pasti oleh proses sosial. Komponen-komponen dalam diri manusia yang bisa terbentuk oleh proses

---

<sup>1</sup> Lindelani Mnguni, Mia Abrie & Liesel Ebersohn (2016) The Relationship Between Scientific Knowledge and Behaviour: An HIV/AIDS Case, *Journal of Biological Education*, 50:2, 147-159, DOI: [10.1080/00219266.2015.1007888](https://doi.org/10.1080/00219266.2015.1007888).

<sup>2</sup> Mahmud (2010). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Sahifa, p. 47.

<sup>3</sup> Caputo, R. K. (1998). Economic well-being in a youth cohort. *Families in Society*, 79(1), 83-92. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/230157868?accountid=38628>

sosial ada tiga, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen afektif. Afektif merupakan komponen emosi, kognitif merupakan komponen intelektual, dan konatif merupakan komponen kebiasaan.

Menurut Behaviorisme, seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar, kecuali instinknya. Behaviorisme tidak peduli apakah manusia itu baik atau buruk atau apakah rasional atau emosional, aliran ini hanya menganalisis bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh lingkungannya. Dari aliran ini munculnya konsep manusia sebagai makhluk mesin. Gambar berikut ini adalah skema yang memeragakan alur hubungan pengetahuan dengan perilaku manusia.

## Gambar 1

Hubungan Perilaku dan Pengetahuan ala Behaviorisme





Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang berinduk kepada empirisme. Empirisme beranak pinak hingga melahirkan—salah satunya—aliran Behaviorisme. Leluhur utama aliran ini adalah Aristoteles. Pada perkembangan berikutnya, Behaviorisme lebih sering disebut sebagai *psikologi aristotelian*. Dalam aliran filsafat kepribadian, empirisme dibesarkan oleh John Locke.

Empirisme menyatakan bahwa pada saat lahir manusia tidak memiliki warna mental. Warna mental yang dimiliki manusia dalam hidupnya merupakan hasil pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya jalan memiliki pengetahuan. Pandangan ini sangat kontras dengan aliran idea Plato yang menyatakan bahwa idea menghasilkan pengetahuan, bukan pengalaman. Secara psikologis, pengalaman indriawi—menurut empirisme—menentukan perilaku manusia, kepribadiannya, dan temperamennya. Pikiran dan perasaan manusia bukan penyebab perilaku. Tapi, perilaku masa lalulah yang menyebabkan manusia berperilaku. Bahkan, bukan sekadar manusia yang dibentuk oleh pengalaman. Makhluk yang lainnya, seperti binatang—jin tidak disebut-sebut oleh aliran ini—sama-sama berperilaku karena pengalaman. Makhluk berpengetahuan sebagai akibat pengalaman yang berulang-ulang.

Pelaziman (*conditioning*) adalah istilah yang dipakai Behaviorisme untuk menyebut pengalaman berulang-ulang. Konsep yang sama telah lebih dahulu ditemukan oleh Ibn Sīnā ratusan tahun sebelum munculnya aliran Behaviorisme. Pelazimanlah yang memengaruhi

manusia begitu juga makhluk lain dalam berperilaku. Dalam percobaannya, Ivan Pavlov—teman sejawat Sechenov yang menemukan konsep pelaziman dan disebut-sebut sebagai orang pertama kali melakukan percobaan dalam proses pelaziman—mengggunakan anjing piaraannya. Di depan anjingnya yang sedang lapar, Pavlov menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, anjing tidak mengeluarkan air liur. Lalu, daging disimpan di hadapannya dan anjing mengeluarkan air liur. Setiap kali lampu dinyalakan, sekerat daging segar ikut dihadirkan. Setelah beberapa kali percobaan, setiap kali lampu dinyalakan anjing selalu mengeluarkan air liur walaupun tidak ada daging di hadapannya. Kata Pavlov, air liur anjing merupakan respons pelaziman (*conditioned response*) dan cahaya lampu merupakan perangsang pelaziman (*conditioned stimulus*) tersebut. Kebiasaan anjing mengeluarkan air liur setiap kali melihat lampu dinyalakan adalah hasil pengalaman yang dialaminya berkali-kali.

Suatu hari Pavlov mendapat laporan dari mahasiswanya. Mahasiswa ini menemukan kejadian aneh. Dia melakukan pelaziman pada seekor anjing agar bisa membedakan lingkaran dari elips. Anjing milik mahasiswa ini mengeluarkan air liur ketika melihat elips tetapi tidak ketika melihat lingkaran. Secara perlahan, mahasiswa itu mengubah elips. Sehingga, lama-kelamaan elips itu menyerupai lingkaran. Anjing tersebut, akhirnya, tidak lagi mampu membedakan mana lingkaran mana elips.

Setelah diupayakan berkali-kali, kemampuan anjing untuk membedakan bentuk lingkaran dan elips bukan hanya tidak membaik.

Bahkan, makin lama semakin buruk. Ujungnya, pengetahuan anjing itu hilang sama sekali. Pada saat yang sama, perilaku anjing berubah drastis. Anjing yang semula penurut, berubah menjadi galak dan pemberang. Alat-alat eksperimen milik mahasiswa itu dicabik-cabik oleh giginya. Ketika dibawa ke ruangan eksperimen, anjing itu menyalak keras dan beringas akan menerjang.

Setelah mendapat laporan dari mahasiswanya, Pavlov menyatakan bahwa anjing itu mengalami neourosis eksperimental. Manusia akan menderita penyakit yang sama bila dia berhadapan dengan situasi stres yang tidak dapat di atasi. Persis anjing tadi yang mengalami stres akibat ia tidak dapat mengatasi beban yang dihadapinya. Anjing bingung membedakan mana elips mana lingkaran, ketika bentuk elips diubah sedikit demi sedikit oleh mahasiswa untuk menjadi lingkaran. Di saat itulah anjing stres! Ia mengalami gangguan kejiwaan akibat proses belajar yang keliru. Seperti itu pula manusia. Ia akan mengalami gejala neourosis atau psikosis apabila proses belajarnya keliru atau mengalami stres yang berat. Sama dengan anjing.

Jadi, kata Behaviorisme, kalau terjadi gangguan jiwa pada seseorang, tidak ada hubungannya dengan jiwa sama sekali. Itu adalah akibat pelaziman yang keliru. Mengobatinya adalah suruhlah orang itu untuk melakukan pelaziman baru. Behaviorisme memopularkan pelaziman baru ini dengan istilah kontrapelaziman (*counterconditioning*). Hal yang sama dapat dilakukan apabila terjadi keterbelakangan cara berpikir pada anak didik. Keterbelakangan ini adalah akibat anak melakukan pelaziman yang keliru. Manusia tidak berbeda dalam kadar kepintaran. Yang

membedakan adalah proses pelaziman. Pelaziman yang tepat menghasilkan anak didik yang pintar. Sedangkan, pelaziman yang keliru menghasilkan anak didik yang terbelakang. Apabila seorang guru menghadapi anak didik yang terbelakang, ia dapat mengobatinya dengan pelaziman yang tepat.

Demikian, pandangan aliran Behaviorisme terhadap manusia. Behaviorisme, kata Jalaluddin Rakhmat (1996), adalah aliran ilmu jiwa yang tidak peduli dengan jiwa. Behaviorisme tidak peduli dengan kesadaran manusia. Sebab, kesadaran manusia adalah perkara nonindriawi yang berada di luar area psikologi sebagai sains. Manusia dibentuk oleh pelaziman atau pengalaman.

Tapi, benarkah semua perilaku dapat dijelaskan dengan pelaziman? A. Bandura—seorang ahli psikologi sosial yang dekat dengan Behaviorisme tapi sering mengkritiknya—menjawab: tidak! Ada proses lain yang dapat memengaruhi perilaku manusia. Ganjaran dan hukuman berpengaruh sekali—contohnya—dalam belajar. Mengapa seorang anak yang berusia dua tahun dapat berbicara dalam bahasa ibunya. Behaviorisme tradisional menjelaskan bahwa kata-kata yang semula tidak ada maknanya dipasangkan dengan lambang atau obyek yang punya makna. Mula-mula anak mengucapkan bunyi-bunyi yang tak bermakna (seperti: *ba, ba*). Kemudian, orangtuanya meneguhkan ucapan yang bermakna (mungkin menjadi “bapak”). Dengan cara peneguhan ini terbentuklah bahasa anak yang memungkinkannya berbicara. Tapi, dengan cara demikian, anak harus menghabiskan bertahun-tahun untuk dapat berbicara, demikian kata Bandura. Malah,

kata Bandura, cara demikian tidak dapat menjelaskan mengapa anak-anak dapat mengucapkan kalimat yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya.

Bandura menyebutkan bahwa belajar terjadi karena peniruan. Kemampuan meniru respons orang lain, misalnya meniru bunyi yang sering didengar, adalah penyebab utama belajar. Ganjaran dan hukuman bukanlah faktor utama belajar. Tapi, keduanya adalah faktor penting dalam melakukan suatu tindakan. Bila kreativitas seorang anak didik selalu dihargai (diganjar), ia akan sering melakukannya. Tapi, bila kreativitas seorang anak didik selalu dicela, ia akan menahan diri dari kreatifitas tersebut, walaupun ia memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pandangan Bandura di atas membawa Behaviorisme menjadi lebih berwarna. Namun, pandangan tersebut tidak menyebabkan Behaviorisme dapat menjelaskan segala hal ihwal perilaku manusia. Behaviorisme tetap bungkam, ketika melihat perilaku manusia yang tidak dipengaruhi oleh ganjaran, hukuman, dan peniruan. Para pendaki yang susah payah mendaki gunung yang tinggi, anak-anak muda Jepang yang melakukan bunuh diri, serta perilaku-perilaku lainnya yang tidak berdasarkan hukuman dan ganjaran tidak dapat dijelaskan oleh Behaviorisme. Behaviorisme kesulitan menjelaskan motivasi. Motivasi terjadi di dalam diri individu yang tidak dilirik oleh Behaviorisme yang selalu melihat pada peristiwa-peristiwa eksternal.

Ketika dihubungkan dengan penyakit mental, teori-teori Behaviorisme tentang psikiatri hanya berlaku untuk sebagian penyakit

mental. Akibat ketidakpedulian terhadap kesadaran manusia, Behaviorisme mengalami beberapa kekurangan. *Pertama*, Behaviorisme gagal memasukkan data dari pengalaman subjektif individu yang sangat berarti bagi dirinya. *Kedua*, Behaviorisme gagal menjelaskan dimensi perilaku manusia yang lebih kompleks. Dalam hal ini Behaviorisme tidak dapat menjelaskan tentang keimanan, cinta, keberanian, harapan, dan kecemasan. *Ketiga*, Behaviorisme gagal menjelaskan perihal nilai dan makna dalam eksistensi manusia dan masalah bagaimana manusia harus berhubungan dengan sesama lain. Terakhir, masih banyak kegagalan yang dialami oleh Behaviorisme.

Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani Kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan obyektif. Oleh sebab itu psikologi harus menggunakan metode empiris, seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal reports.

Teori utama dari Watson yaitu konsep stimulus dan respons (S-R) dalam psikologi. Stimulus adalah segala sesuatu obyek yang

bersumber dari lingkungan. Sedangkan respon adalah segala aktivitas sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Watson tidak mempercayai unsur herediter (keturunan) sebagai penentu perilaku dan perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Pemikiran Watson menjadi dasar bagi para penganut behaviorisme berikutnya.

Teori-teori yang dikembangkan oleh kelompok behaviorisme terutama banyak dihasilkan melalui berbagai eksperimen terhadap binatang. Berikut ini disajikan beberapa teori penting yang dihasilkan oleh kelompok behaviorisme:

### **1. *Connectionism* Thorndike.**

Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya:

- Law of Effect; artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan Stimulus – Respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respons, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus- Respons.
- Law of Readiness; artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pemdayagunaan satuan pengantar (conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

- Law of Exercise; artinya bahwa hubungan antara Stimulus dengan Respons akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih.

## **2. Classical Conditioning Ivan Pavlov**

Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya :

- Law of Respondent Conditioning yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat.
- Law of Respondent Extinction yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui Respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun.

## **3. Operant Conditioning B.F. Skinner**

Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya :

- Law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat.
- Law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.



Reber (Muhibin Syah, 2003) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan operant adalah sejumlah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Respons dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam classical conditioning.

#### **4. *Social Learning* Albert Bandura**

Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut Behaviorisme lainnya, Bandura memandang Perilaku individu tidak semata-mata refleksi otomatis atas stimulus (S-R Bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini, bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan.

Aliran psikologi lainnya yang memiliki perhatian pada hubungan antara perilaku dengan pengetahuan adalah aliran Psikonalisasi. Aliran ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1890-an oleh Sigmund Freud. Ia merupakan seorang ahli neurologi yang berhasil menemukan cara-

cara pengobatan yang efektif bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan gejala neurotik dan histeria melalui teknik pengobatan eksperimental yang disebut *abreaction*, sebuah kombinasi antara teknik hipnotis dengan katarsis. Freud mempelajari teknik tersebut dari sahabatnya, Josef Breuer. Bersama-sama dengan Breuer, Freud menangani pasien-pasien dengan gangguan histeria yang menjadi bahan bagi tulisannya, "*Studies in Hysteria*". Kerjasamanya dengan Jean Martin Charcot, dokter syaraf terkenal di Perancis, menjadikan dirinya banyak menggali tentang gejala-gejala psikosomatik dari pasien-pasien yang mengalami gangguan seksual.

Psikoanalisis dikenal juga dengan *depth psychology*, yaitu aliran psikologi yang mencari sebab-sebab perilaku manusia pada alam tak sadarnya. Psikoanalisis memerhatikan struktur jiwa manusia. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Sigmund Freud adalah pendiri aliran psikologi ini. Dalam sejarah psikologi modern, Freud adalah orang pertama yang berusaha merumuskan psikologi manusia.

Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah hasil interaksi tiga subsistem struktur mental manusia, yaitu *Id*, *Ego*, dan *Superego*. *Id* adalah bagian kepribadian manusia yang menyimpan dorongan-dorongan biologis. Ia berupa reservoir energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan. Dalam psikologi Islam, reservoir energi psikis ini disebut nafsu. Sedangkan, dalam psikologi umum disebut dengan instink.

Ada dua instink dominan dalam diri manusia, demikian kata Freud. *Pertama*, libido. Ia berupa instink reproduksi dalam diri manusia yang

menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan mereka yang konstruktif. *Kedua*, thanatos. Ia berupa instink dekonstruktif dan agresif. Instink yang pertama merupakan instink kehidupan. Sedangkan, instink yang kedua adalah instink kematian. Dua instink ini lebih dikenal dengan sebutan dualitas kehidupan manusia. 600 tahun sebelum Freud, perihal dualitas kehidupan manusia telah dikupas panjang lebar oleh Al-Muḥāsibī dengan konsep *tsunāiyyah*-nya. Dalam konsep *tsunāiyyah*-nya, Al-Muḥāsibī menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri hidup dan naluri kematian.

*Id*, kata Freud, bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan ingin segera memenuhi kebutuhannya. *Id* bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Ia adalah tabiat hewani manusia.

Subsistem struktur mental manusia yang *kedua* adalah *ego*. *Ego* merupakan pengawas realitas. *Ego* berfungsi menjembatani tuntutan *Id* dengan realitas dunia luar. *Ego* adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. *Ego*lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewannya dan hidup sebagai wujud yang rasional.

Subsistem struktur mental yang *ketiga*, kata Freud, adalah *superego*. *Superego* merupakan reservoir kaidah moral dan nilai-nilai sosial yang diserap oleh individu dari lingkungannya. *Superego* adalah polisi kepribadian. Ia merupakan hati nurani yang menginternal (membentuk) dari norma-norma sosial dan kultural masyarakat. *Superego* memaksa *ego* untuk menekan hasrat-hasrat yang didesakkan oleh *Id*. Ketika *Id* mendorong seorang anak untuk mangkal dari sekolah, *egonya* merenung

apakah orangtuanya tahu atau tidak. Tiba-tiba, *egonya* diingatkan oleh *superego*nya bahwa dirinya dapat tidak diberi uang sekolah bila diketahui oleh orangtuanya.

Singkat kata, menurut psikoanalisis seluruh perilaku manusia adalah hasil interaksi antara *Id* sebagai komponen biologisnya, *ego* sebagai komponen psikologisnya, dan *superego* sebagai komponen sosialnya.

Pemikiran Psikoanalisis Freud semakin terus berkembang ketika berada di tangan Alfred Adler (1870-1937), sebagai pengikut Freud yang berhasil mengembangkan teorinya sendiri yang disebut dengan *Individual Psychology*. Konsep utama Adler adalah *organ inferiority*. Berangkat dari teorinya tentang adanya *inferiority* karena kekurangan fisik yang berusaha diatasi manusia, ia memperluas teorinya dengan menyatakan bahwa perasaan inferior adalah universal. Setiap manusia pasti punya perasaan inferior karena kekurangannya dan berusaha melakukan kompensasi atas perasaan ini. Kompensasi ini bisa dalam bentuk menyesuaikan diri ataupun membentuk pertahanan yang memungkinkannya mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya, Adler juga membahas tentang *striving for superiority*, yaitu dorongan untuk mengatasi *inferiority* dengan mencapai keunggulan. Dorongan ini sifatnya bawaan dan merupakan daya penggerak yang kuat bagi individu sepanjang hidupnya. Adanya *striving for superiority* menyebabkan manusia selalu berkembang ke arah kesempurnaan. Teorinya ini yang membuat Adler memiliki pandangan lebih optimis dan positif terhadap manusia serta lebih berorientasi ke masa depan dibandingkan Freud yang lebih berorientasi ke masa lalu.

Di antara murid Freud yang “getol” mengkhotbahkan teori gurunya adalah Carl Gustav Jung (1875-1961). Ia merupakan salah seorang murid Freud yang berhasil mengembangkan teorinya sendiri yang disebut *Analytical Psychology*. Jung menekankan pada aspek ketidakadaran dengan konsep utamanya, *collective unconscious*. Konsep ini sifatnya transpersonal, ada pada seluruh manusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui struktur otak manusia yang tidak berubah. *Collective unconscious* terdiri dari jejak ingatan yang diturunkan dari generasi terdahulu, cakupannya sampai pada masa pra-manusia. Misalnya, cinta pada orangtua, takut pada binatang buas, dan lain-lain. *Collective unconscious* ini menjadi dasar kepribadian manusia karena didalamnya terkandung nilai dan kebijaksanaan yang dianut manusia. Ide-ide yang diturunkan atau *primordial images* disebut sebagai archetype, yang terbentuk dari pengalaman yang berulang dalam kurun waktu yang lama. Ada beberapa *archetype* mendasar pada manusia, yaitu persona, anima, *shadow*, *self*. *Archetype* inilah yang menjadi isi *collective unconsciousness*.

Aliran selanjutnya adalah aliran Psikologi kognitif, sebagian aliran modifikasian dari Behaviorisme yang tidak dapat menjawab seluruh hal ihwal manusia. Oleh psikologi kognitif manusia tidak dipandang sekadar makhluk pasif yang tunduk sepenuhnya pada lingkungan. Dia bukan lagi sebagai meja lilin atau *tabula rasa* yang dapat dibentuk semauanya oleh stimulus-stimulus. Manusia tidak lagi seperti mesin. Tapi, ia adalah pengolah informasi dan pemecah masalah. Secara aktif, ia dapat memperhatikan, menafsirkan, mengolah, dan menggunakan informasi

tersebut. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan. Manusia adalah makhluk yang berusaha memahami lingkungan.

Asal-usul psikologi kognitif terlacak sampai kepada aliran rasionalisme dalam filsafat. Immanuel Kant, Rene Descartes, malah Plato, disebut-sebut sebagai para pioner psikologi ini. Kaum rasionalis memertanyakan apakah betul bahwa penginderaan manusia, melalui pengalaman langsung—sebagaimana ditelan habis-habisan oleh aliran Empirisme—sanggup memberikan kebenaran? Alat-alat indriawi manusia dipertanyakan oleh kaum rasionalis karena sering gagal menyajikan informasi yang akurat. Psikolog Muslim yang sama memertanyakan (meragukan) kedudukan alat-alat indriawi dalam menangkap kebenaran adalah Al-Ghazālī. Pertanyaan-pertanyaan bernada ragu itu dimuat oleh beliau dalam buku *Al-Munqizd min Al-Dhalāl*.

Aliran kognitif menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan piranti-piranti indriawi. Jiwalah yang menafsirkan secara aktif pengalaman indriawi. Jiwalah yang menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna. Tidak selamanya stimula eksternal kita respons. Seorang ibu yang sedang tidur lelap tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dan riuh rendah suara di luar. Tapi, ketika bayi yang ada di sampingnya menangis secara tergesa-gesa ia bangun. Aliran kognitif lebih dekat dengan aliran tasawuf dalam Islam yang menyatakan bahwa pengetahuan yang ditemukan jiwa dijamin aman. Lain halnya dengan pengetahuan yang didapat melalui alat-alat indriawi. Seiring dengan kemungkinan terjadinya *error* pada alat-alat indriawi,

tidak mustahil pengetahuan yang didapatnya pun mengalami *error*. Demikian, kata Al-Ghazzālī dan Abū Thālib Al-Makkī.

Aliran kognitif lebih berwarna ketika dikembangkan oleh seorang psikolog Jerman yang bernama Kurt Lewin. Lewin menyebutkan bahwa perilaku manusia harus dilihat konteksnya. Dari ranah fisika, Lewin meminjam konsep medan (*field*) untuk menunjukkan totalitas gaya yang memengaruhi seseorang pada saat tertentu. Perilaku manusia bukan sekadar respons pada stimuli. Tapi, ia adalah produk berbagai gaya yang memengaruhinya secara spontan. Lewin menyebut seluruh gaya psikologis yang memengaruhi manusia dengan istilah ruang hidup (*life space*). Ruang hidup terdiri dari tujuan dan kebutuhan individu, semua faktor yang disadarinya, dan kesadaran diri. Lewin merumuskan secara pasti bahwa perilaku manusia adalah hasil interaksi antara dirinya dengan ruang psikologisnya.

Lebih lanjut Lewin membahas tentang tensi yang menunjukkan suasana kejiwaan yang terjadi ketika kebutuhan psikologis belum terpenuhi. Konsep tensi melahirkan banyak teori yang digabung dengan istilah teori konsistensi kognitif. Secara dasar teori ini menyebutkan bahwa individu berusaha mengoptimalkan makna dalam persepsi, perasaan, kognisi, dan pengalamannya. Bila makna tidak optimal, timbul tensi yang memotivasi orang untuk menguranginya.

Hubungan perilaku dengan pengetahuan dikaji juga oleh aliran psikologi Humanistik, yang muncul pada pertengahan Abad Kedua Puluh, sebagai reaksi terhadap Behaviorisme dan Psikoanalisis. Keduanya dianggap telah mereduksi manusia sebagai mesin atau makhluk yang

rendah. Psikologi Humanistik dianggap sebagai revolusi ketiga dalam psikologi. Revolusi pertama dan yang keduanya diisi oleh Psikoanalisis dan Behaviorisme. Kedua aliran psikologi ini tidak menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan. Behaviorisme memosisikan manusia sebagai robot tanpa jiwa. Sedangkan, psikoanalisis memosisikan manusia sebagai makhluk yang melulu dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Abraham Maslow, salah seorang perintis Psikologi Kognitif, berkata “Dengan sedikit menyederhanakan, kita dapat menyatakan bahwa Freud seakan-akan memasok kita dengan separoh psikologi yang sakit, dan sekarang kita harus mengisinya dengan separoh lainnya yang sehat (Rakhmat, 1996).”

Psikoanalisis dan Behaviorisme tidak memosisikan manusia sebagai manusia. Keduanya tidak bisa menjelaskan aspek eksistensi manusia yang positif dan penentu, seperti cinta, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Kekosongan inilah yang diisi oleh Psikologi Humanistik.

Psikologi Humanistik tidak melihat manusia sekadar seonggok daging yang tidak memiliki makna. Manusia bukan sekadar pelakon dalam panggung sandiwara masyarakat dan pencari identitas. Tapi, manusia adalah makhluk yang mencari makna. Dikabarkan bahwa dalam surat yang dikirim oleh Sigmund Freud kepada Prancis Bonaparte dinyatakan bahwa pada saat manusia bertanya apa makna dan nilai kehidupannya, saat itu ia sedang sakit. Dengan tegas dan tanggap Frankl menyatakan, “Keliru apa yang dikatakan oleh Freud!” Justeru, manusia menjadi manusia ketika memertanyakan apakah hidupnya bermakna.



Pada tahap berikutnya, Psikologi Humanistik menganggap bahwa dimensi spiritual bagian dari sifat khas manusia.

Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an, dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir tahun 1950-an, para ahli psikologi, seperti Abraham Maslow, Carl Rogers dan Clark Moustakas mendirikan sebuah asosiasi profesional yang berupaya mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia, seperti tentang *self* (diri), aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas dan sejenisnya.

Kehadiran psikologi humanistik muncul sebagai reaksi atas aliran psikoanalisis dan behaviorisme serta dipandang sebagai “kekuatan ketiga” dalam aliran psikologi. Psikoanalisis dianggap sebagai kekuatan pertama dalam psikologi yang awal mulanya datang dari psikoanalisis ala Freud yang berusaha memahami tentang kedalaman psikis manusia yang dikombinasikan dengan kesadaran pikiran guna menghasilkan kepribadian yang sehat. Kelompok psikoanalisis berkeyakinan bahwa perilaku manusia dikendalikan dan diatur oleh kekuatan tak sadar dari dalam diri.

Dalam mengembangkan teorinya, psikologi humanistik sangat memerhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitik-beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab personal, otonomi, tujuan dan pemaknaan. Dalam hal ini, James Bugental (1964) mengemukakan

tentang 5 (lima) dalil utama dari psikologi humanistik, yaitu: (1) keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen; (2) manusia memiliki keunikan tersendiri dalam berhubungan dengan manusia lainnya; (3) manusia memiliki kesadaran akan dirinya dalam mengadakan hubungan dengan orang lain; (4) manusia memiliki pilihan-pilihan dan dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya; dan (5) manusia memiliki kesadaran dan sengaja untuk mencari makna, nilai dan kreativitas.

Terdapat beberapa ahli psikologi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan psikologi humanistik. Sumbangan Snyggs dan Combs (1949) dari kelompok fenomenologi yang mengkaji tentang persepsi. Dia percaya bahwa seseorang akan berperilaku sejalan dengan apa yang dipersepsinya. Menurutnya, bahwa realitas bukanlah sesuatu yang melekat dari kejadian itu sendiri, melainkan dari persepsinya terhadap suatu kejadian.

Dari pemikiran Abraham Maslow (1950) yang memfokuskan pada kebutuhan psikologis tentang potensi-potensi yang dimiliki manusia. Hasil pemikirannya telah membantu guna memahami tentang motivasi dan aktualisasi diri seseorang, yang merupakan salah satu tujuan dalam pendidikan humanistik. Morris (1954) meyakini bahwa manusia dapat memikirkan tentang proses berfikirnya sendiri dan kemudian mempertanyakan dan mengoreksinya. Dia menyebutkan pula bahwa setiap manusia dapat memikirkan tentang perasaan-persaannya dan juga memiliki kesadaran akan dirinya. Dengan kesadaran dirinya, manusia dapat berusaha menjadi lebih baik. Carl Rogers berjasa besar

dalam mengantarkan psikologi humanistik untuk dapat diaplikasikan dalam pendidikan. Dia mengembangkan satu filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya pembentukan pemaknaan personal selama berlangsungnya proses pembelajaran dengan melalui upaya menciptakan iklim emosional yang kondusif agar dapat membentuk pemaknaan personal tersebut. Dia memfokuskan pada hubungan emosional antara guru dengan siswa.

Berkenaan dengan epistemologinya, teori-teori humanistik dikembangkan lebih berdasarkan pada metode penelitian kualitatif yang menitik-beratkan pada pengalaman hidup manusia secara nyata. Kalangan humanistik beranggapan bahwa usaha mengkaji tentang mental dan perilaku manusia secara ilmiah melalui metode kuantitatif sebagai sesuatu yang salah kaprah. Tentunya hal ini merupakan kritikan terhadap kalangan kognitivisme yang mengaplikasikan metode ilmiah pendekatan kuantitatif dalam usaha mempelajari tentang psikologi. Sebaliknya, psikologi humanistik pun mendapat kritikan bahwa teori-teorinya tidak mungkin dapat memfalsifikasi dan kurang memiliki kekuatan prediktif sehingga dianggap bukan sebagai suatu ilmu (Popper, 1969, Chalmers, 1999).

Hasil pemikiran dari psikologi humanistik banyak dimanfaatkan untuk kepentingan konseling dan terapi, salah satunya yang sangat populer adalah dari Carl Rogers dengan client-centered therapy, yang memfokuskan pada kapasitas klien untuk dapat mengarahkan diri dan memahami perkembangan dirinya, serta menekankan pentingnya sikap tulus, saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu

mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers menyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas konselor hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para konselor bukanlah hal yang penting dalam melakukan *treatment* atau pemberian bantuan kepada klien. Selain memberikan sumbangannya terhadap konseling dan terapi, psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik (*humanistic education*). Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik ini.

Hubungan perilaku manusia dan pengetahuan ditelaah juga oleh para ahli psikologi Islam, yang terwakili oleh para sufi dengan telaah pada sisi nonragawi manusia. Para psikolog Islam, seperti Al-Muḥāsibī, Al-Tustarī, Abū Thālib Al-Makkī, dan Al-Ghazālī, memandang bahwa manusia adalah makhluk bermakna yang memiliki potensi fisik dan metafisik. Secara asli manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Penciptanya. Ia bukan sekadar kumpulan tulang dan daging yang dibungkus oleh kulit. Tapi, ia adalah kesatuan dari jiwa dan raga. Jiwa adalah bagian dalam manusia yang termulia. Sedangkan, raga adalah sisi hewani yang digerakan oleh jiwa tersebut. Jiwa yang ada dalam diri manusia bersifat suci dan bukan materi. Ia adalah titipan Ilahi yang suatu saat akan diambilnya. Jiwa inilah yang dapat menangkap pengetahuan.

Jiwa inilah yang dapat mendistorsi, memilah, dan menempatkan seluruh informasi. Ia adalah pengelola informasi yang diterimanya.

Dalam psikologi Islam, manusia itu bukan seperti yang digambarkan oleh Freud dengan tendensi seksualitasnya. Bukan sekadar *superiority-complex* yang digambarkan oleh Adler. Bukan sekadar 'struktur kekurangan' sebagaimana digambarkan oleh Jung. Manusia bukan sekadar makhluk materi dan ekonomi sebagaimana digambarkan oleh Karl Mark. Manusia bukan sekadar atom-atom ruhani sebagaimana digambarkan oleh kaum Borjuis. Tetapi, manusia lebih dari semua itu. Ia adalah 'tiupan' dari ruh Allah dan sekepal dari tanah yang suci. Ia adalah 'tiupan' Allah yang mencakup aspek ruhani, nilai, dan makna-makna spiritualitasnya dan mencakup aspek materi dan fisik kebumian.

Makhluk yang ajaib ini bukan seperti yang diduga oleh Freud, yaitu tidak dapat mengubah dirinya atau diubah oleh orang lain. Namun, dengan kehendak manusiawinya, yang merupakan bagian dari kehendak Allah, ia dapat memperbaharui dirinya, mengubahnya, memperbaikinya, mendidiknya, dan mengembangkannya kepada keadaan yang lebih baik dan lebih luhur, berapa pun umurnya. Karakternya tidak seperti yang digambarkan oleh Freud, yaitu berbentuk permanen setelah umur lima tahun. Karakter manusia, menurut Psikologi Islam, fleksibel. Bukan perkara mustahil ada manusia yang berubah karakter jahatnya di umur menjelang tua. Sebaliknya, bukan satu atau dua manusia yang berubah karakter baiknya hingga berbalik menjadi jahat ketika menjelang umur kematian. Pandangan inilah yang melandasai konsep taubat dalam Islam.

Ibn Sīnā menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat tiga unsur jiwa, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Jiwa tumbuhan merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh yang bersifat alamiah dan mekanistik. Jiwa tumbuh-tumbuhan manusia memiliki tiga daya. *Pertama*, daya nutrisi. Daya nutrisi adalah daya yang mengubah makanan menjadi bentuk tubuh. Melalui daya ini makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dijadikan sebagai pembaharu unsur tubuh yang rusak. *Kedua*, daya penumbuh. Daya penumbuh adalah daya yang menambah kesesuaian seluruh bagian tubuh yang diubah karena makanan, baik dari sisi panjang, lebar, maupun volume. *Ketiga*, daya generatif. Daya generatif adalah daya yang mengolah potensi-potensi reproduksi yang telah tersedia secara lengkap dalam tubuh manusia.

Unsur jiwa selanjutnya, menurut Ibn Sīnā, adalah jiwa hewani. Jiwa hewani adalah potensi kesempurnaan bagi manusia yang bersifat mekanistik. Jiwa ini dapat menangkap berbagai parsialitas dan bergerak karena keinginan. Jiwa ini memiliki dua daya, yaitu daya motorik dan daya sensorik.

Unsur jiwa yang terakhir adalah jiwa rasional. Jiwa rasional, kata Ibn Sīnā, adalah daya yang mengartikulasikan berbagai objek dan pesan. Ia merupakan potensi alamiah yang dapat memersepsi potret-potret universal nonmaterial (termasuk pengetahuan). Ibn Sīnā, sebagaimana Al-Fārābī sebelumnya, membagi jiwa rasional ini kepada dua daya, yaitu daya akal praktis dan daya akal teoretis. Daya akal praktis cenderung mendorong manusia memuaskan perbuatan yang pantas dilakukan atau ditinggalkan. Istilah lain untuk menyebut daya ini adalah *perilaku moral*.

Sementara itu, akal teoretis adalah daya yang memotret perkara-perkara universal yang nonindriawi.

Jadi, manusia menurut psikologi Islam—sebagaimana diwakili oleh Ibn Sīnā—adalah makhluk yang berdimensi nabati, hewani, dan ruhani (rasional). Dimensi nabati merupakan keadaan alami manusia yang terkait dengan naluri perkembangan, melahirkan, dan makan. Dimensi hewani merupakan keadaan alamiahnya yang cenderung pada tabiat alam kasar. Sedangkan, dimensi ruhani merupakan keadaan alamiahnya yang cenderung pada tabiat kesakralan. Dimensi ruhani inilah yang menjadikan manusia beragama dan meyakini makna kehidupan lebih dari sekadar rotasi biologis.

Al-Ghazālī, psikolog Muslim yang populer, menyebutkan bahwa karakter jiwa manusia tidak bersifat permanen, sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Al-Ghazālī mencontohkan burung *al-bazi* (sejenis burung Rajawali) yang dapat diubah karakternya. Pada mulanya, burung *al-bazi* adalah binatang liar. Namun, melalui pembiasaan, burung ini bisa menjadi jinak. Begitu juga kuda. Dari asalnya binatang liar ia bisa menjadi binatang yang jinak dan patuh. Semua itu merupakan contoh perubahan karakter. Pandangan Al-Ghazālī ini merupakan bantahan terhadap para ahli jiwa di zamannya yang menyatakan bahwa akhlak atau karakter tidak dapat diubah.

### **Faktor-Faktor Personal Manusia**

Al-Ghazālī menyatakan bahwa sebagian perilaku manusia ditentukan oleh faktor personal. Sedangkan, McDougall secara pasti menyebutkan bahwa seluruh perilaku manusia, bukan sebagian, ditentukan oleh faktor

personal. Mengapa manusia bertengkar? Karena ia memiliki instink berkelahi. Mengapa manusia bernegara atau berorganisasi? Karena ia memiliki instink berkelompok. Mengapa manusia melakukan perkawinan? Karena manusia memiliki instink reproduksi. Mengapa manusia belajar? Karena manusia memiliki instink ingin tahu.

Lain halnya dengan Behaviorisme yang memandang bahwa manusia berperilaku bukan ditentukan oleh faktor personal. Faktor situasi, kata Behaviorisme, yang menentukan manusia berperilaku. Boleh saja Anda berjiwa terbuka kepada istri sementara tertutup ketika menjadi dekan di sebuah fakultas. Boleh saja Anda bersikap kasar dan galak kepada orang yang meminjamkan uang ketika ia menagih padahal ketika meminjam Anda sangat lembut. Mungkin saja seorang anak peserta didik sangat sopan bertutur kata di hadapan orangtuanya tapi berkata kasar dan kotor ketika sedang bermain dengan kawan sebayanya. Jadi, kata Behaviorisme, situasi atau lingkungan yang menentukan perilaku manusia.

Sepertinya, pandangan McDougall di atas hangus oleh teori-teori yang dikemukakan oleh Behaviorisme. Pertanyaan yang muncul mana pandangan yang benar? Apakah yang benar itu pandangan yang menyatakan bahwa perilaku manusia berpusat pada faktor personal atau pandangan yang menyatakan bahwa perilaku manusia berpusat pada situasi?

Tampaknya, yang benar adalah interaksi keduanya menjadikan manusia berperilaku. Pandangan inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika dia menyatakan bahwa manusia lahir membawa



potensi perilaku (*fithrah*) dan dipengaruhi lingkungan. Hal ini tersirat dalam sebuah hadis, “*Setiap anak yang dilahirkan membawa fithrah. Kemudian, bapak dan ibunya yang mengubahnya.*” Penyebutan fitrah atau potensi perilaku bawaan didahulukan dalam sabda Nabi Saw. tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia merupakan motif primer manusia.

Dua faktor penentu perilaku manusia (faktor personal [potensi perilaku bawaan] dan lingkungan) kita bahas satu persatu. Kita dahulukan pandangan yang menyatakan bahwa perilaku manusia berpusat pada faktor personal.

Ada dua faktor personal yang memengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis.

### ***Faktor Biologis***

Seluruh ahli mantik Islam sepakat bahwa manusia adalah hewan (*ḥayāwān*).<sup>2</sup> Definisi manusia yang paling populer dalam disiplin ilmu mantik adalah hewan yang berpikir. Bahasa Arabnya: *ḥayāwān nāthiq*. Kata *ḥayāwān* menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk biologis yang tidak berbeda dengan hewan lain. Manusia akan lapar, seperti halnya—maaf kalau mengganggu Anda—kucing, jika tidak makan selama dua puluh jam. Manusia membutuhkan lawan jenis untuk reproduksi, begitu pula kerbau. Sehubungan dengan itu, seperti semua organisme yang lain, manusia memiliki struktur biologis yang berkembang dalam jangka waktu sangat panjang. Struktur biologis ini membantu menentukan bagaimana manusia bertindak dan berpikir.

Faktor biologis manusia terlibat dalam seluruh kegiatan manusia. Bahkan, ia terpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologis. Artinya, warisan biologis moyang seseorang menentukan perilakunya. Gen orangtua seseorang dapat berpengaruh terhadap gen orang yang bersangkutan. Gen ini merupakan unit dasar hereditas yang merupakan unit informasi biokimia. Gen terdiri dari unsur pembentuk dasar semua makhluk hidup yang disebut *deoxyribonucleic acid* dengan singkatan poplarnya DNA. DNA mempunyai kemampuan unik untuk menciptakan tiruan (*replica*) yang betul-betul sama dengan dirinya. Karena gen terdiri dari DNA, kata Sanderson (2003), ia dapat menciptakan tiruan yang pasti sama dengan dirinya sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, ia dapat memertahankan dirinya dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Pada umumnya, dalam waktu yang panjang, gen-gen dapat membuat tiruan (*replica*) dirinya sendiri secara sempurna pada generasi penggantinya. Namun, kadang terjadi kesalahan dalam mekanisme peniruan diri tersebut. Sehingga, gen mengalami kegagalan dalam menciptakan tiruannya yang benar-benar sama. Kegagalan ini dikenal dengan istilah *mutasi gen*. Dalam suatu populasi makhluk hidup, mutasi semacam itu selalu muncul—paling tidak sedikit dalam setiap generasi baru. Karena produksi konstan dari gen-gen yang bermutasi ini, variabelitas generasi baru selalu muncul dalam populasi makhluk hidup.

Kembali kepada perihal faktor biologis, struktur DNA menyimpan seluruh memori warisan biologis yang dapat diterima oleh seseorang. Pengaruh warisan biologis ini sangat besar. Sebuah aliran baru sampai menyebutkan bahwa segala kegiatan manusia—termasuk agama,

kebudayaan, dan moral—berasal dari struktur biologinya. Aliran ini mengenalkan dirinya sebagai aliran sosiobiologi.

Lionel Tiger dan Robin Fox (1971), dua orang pemopuler aliran sosiobiologi, menyatakan bahwa manusia dilengkapi oleh biogramar, yaitu serangkaian instruksi biologis dasar yang memengaruhi mereka untuk berperilaku. Artinya, kata E.O. Wilson—sosiobiolog yang datang empat tahun setelah Tiger dan Fox dengan teori *kin selection*-nya yang terkenal—perilaku sosial manusia dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetik dalam jiwa manusia itu sendiri. Program ini disebut dengan *epigenetic rules*. Ia mengatur perilaku manusia mulai dari menghindari perilaku sumbang (*incest*), kemampuan memahami ekspresi wajah, hingga pada masalah persaingan politik, dan dominasi kaum pria pada kaum perempuan.

Para sosiobiolog memandang beberapa hal sebagai unsur paling esensial dalam biogramar manusia: (1) kecenderungan manusia untuk membentuk kelompok dan masyarakat yang sangat hirarkis dengan kompetisi mendapatkan status sebagai hal yang sangat penting, (2) kecenderungan kaum lelaki untuk menyatu dalam suatu koalisi politik di mana mereka memertahankan dominasi politik dan pengendalian terhadap wanita, (3) kecenderungan ibu dan anak untuk membentuk keterikatan timbal balik, (4) kecenderungan manusia (terutama pria) melakukan agresi dan kekerasan, (5) kecenderungan manusia untuk memertahankan ruang teritorial dari gangguan orang luar.

Walaupun tidak sedikit sosiolog yang menolak sosiobiologis sebagai determinisme biologis dalam peta sosial, tidak seorang pun yang

menolak fakta bahwa struktur biologis manusia—genetika, sistem sarap, dan sistem hormonal—sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial seseorang. Struktur genetis, misalnya, memengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem sarap berpengaruh pada sistem kerja otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sedangkan, sistem hormonal bukan sekadar memengaruhi mekanisme biologis. Tapi, ia pun memengaruhi proses psikologis seseorang.

Gangguan sistem hormonal, yang oleh Yūsuf Madan—seorang ahli psikologi Islam dari Universitas Teheran Iran—disebut dengan *ikhtilāl*, dapat memengaruhi perilaku penyimpangan manusia, salah satunya penyimpangan seks. Kelebihan dan kekurangan sekresi hormon, kata Madan, berpengaruh terhadap kehidupan intelektual, emosional, dan fisik seseorang. Sangat meyakinkan, lanjut Madan, bahwa perilaku seksual pada manusia, baik anak-anak atau dewasa, terkait erat dengan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar seks.

Temuan-temuan ilmiah menegaskan bahwa janin manusia membawa hormon seks ganda. Hormon seks ganda tersebut dikenal dengan sebutan hormon *testoteron* dan *estrogen*. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, membawa dua hormon seks tersebut. Posisi dominan hormon *testoteron* pada laki-laki dan hormon *estrogen* pada wanita membedakan antara keduanya. Gangguan pada keseimbangan sistem hormonal dapat saja terjadi. Bisa saja janin laki-laki mendapat hormon kewanitaan (*estrogen*) dalam kapasitas yang besar sementara hormon kekelakian (*testoteron*)nya sedikit. Hal ini menyebabkan potensi kemaskulinannya melemah dan munculnya perilaku kefeminiman.

Akibatnya, ia menjadi banci. Hal yang sama dapat terjadi pada janin wanita yang dominasi hormon kelelakiannya lebih kuat daripada hormon kewanitaannya. Keadaan ini dapat menyebabkan wanita berperilaku seperti laki-laki (*tomboy*) yang dalam istilah Yusuf Madan disebut dengan *istirjāl*.

Pada 1970-an para biolog yang bekerjasama dengan para neurolog berusaha untuk merekayasa genetik. Melalui manipulasi genetik, mereka meyakini bahwa perilaku manusia dapat dikendalikan. Sistem sarapnya dapat dikontrol dan sistem hormonalnya dapat ditata. Mereka, sebagai kerja tahap awal, melakukan *quality control* terhadap gen-gen bakal manusia, (Rakhmat, 1996: 34). Dengan bedah otak, jarum-jarum hipodermik yang dihubungkan dengan *push-button radio device* atau obat-obatan, kita dapat mengubah orang yang penyabar menjadi pemarah, yang gelisah menjadi tenang, dan yang penyedih menjadi periang. Gen-gen yang resesif dapat disingkirkan sedangkan gen-gen yang meningkatkan kualitas manusia dapat dipertahankan. Gen-gen yang memiliki karakter agresif kita ganti dengan gen-gen yang memiliki karakter penyantun. Demikian, dikatakan Vance Packard dalam bukunya, *The People Shapers*.

Ada dua hal penting yang menunjukkan bahwa faktor biologis berpengaruh terhadap perilaku. *Pertama*, telah diakui secara meluas adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia. Perilaku ini bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Istilah populer untuk menyebut bawaan tersebut adalah instink. Bercinta dan menyayangi anak bukan dipicu oleh lingkungan. Tanpa bersentuhan dengan orang lain pun

keinginan untuk bercumbu dan menyayangi anak tetap ada. Mencintai anak bukan hasil belajar. Ia muncul sebagai karakter bawaan dalam jiwa manusia. *Kedua*, diakui bahwa ada motif biologis yang mendorong manusia berperilaku. Kebutuhan seksual dan makan adalah di antara sekian motif biologis yang penting dalam diri manusia. Orang yang lapar lebih cepat tersinggung adalah bukti adanya motif biologis yang memengaruhinya untuk cepat marah. Ini menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang perilakunya dipengaruhi oleh naluri hewani.

### ***Faktor Sosiopsikologis***

Proses sosial membentuk karakteristik manusia sebagai pelakunya. Beberapa komponen dalam diri manusia dibentuk secara perlahan—tapi pasti—oleh proses sosial tersebut. Komponen-komponen dalam diri manusia yang biasa terbentuk oleh proses sosial ada tiga, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Afektif merupakan komponen emosional manusia. Kognitif merupakan komponen intelektual manusia. Sedangkan, konatif adalah aspek volisional yang terkait dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

Komponen afektif terdiri dari motif sosiogenis, sikap, dan emosi. Motif sosiogenis sering dianggap sebagai motif sekunder yang membentuk perilaku sosial. Ia tidak dianggap sebagai motif primer walaupun peranannya dalam membentuk perilaku manusia sangat kuat. Secara sederhana, motif-motif sosiogenis dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### ***1. Motif ingin tahu***

Setiap orang, Anda salah satunya, berusaha memahami dan memperoleh arti dari dunianya. Balita Anda yang mengacak-acak mainan yang ada di hadapannya adalah dalam rangka memperoleh arti. Ketika dia menangis, marah, dan merengek gara-gara mainannya, kata para psikolog perkembangan, adalah bentuk peresponan pada dunia yang sedang dihadapinya.

Kecenderungan menemukan arti dari dunia yang Anda hadapi, mendorong Anda untuk mencari jawaban sendiri, apabila sarana informasi sangat terbatas. Anda akan mengambil kesimpulan tanpa menunggu informasi itu lengkap terlebih dahulu. Bila di musim kemarau tiba-tiba hujan turun dengan lebat, dulu (sebelum menjadi sarjana) Anda menafsirkan gejala alam ini dengan seseorang yang memandikan kucing. Ketika ada suara Burung Hantu (dalam Bahasa Sunda disebut: *Koreak* atau *Buwek*) yang bersuara di malam hari, secara cepat saya menafsirkan bahwa ada makhluk halus yang lewat. Ini semua merupakan akibat dari motif ingin tahu manusia.

## 2. *Motif kompetensi*

Anda selalu ingin membuktikan bahwa diri Anda mampu mengatasi persoalan hidup. Perasaan ini terkait dengan tingkat emosional, perkembangan sosial, dan kapasitas kecerdasan intelektual Anda. Motif ini didorong secara primordial oleh kebutuhan rasa ingin aman. Ingin mendapat jaminan di hari tua mendorong Anda semangat berjuang untuk menenteng map berkeliling kota mencari pekerjaan. Bapak Anda ingin sekali anaknya, yaitu Anda, bersekolah dengan baik supaya nanti menjadi investasi ekonominya. Sehingga, ayah Anda rela kalau kambing,

ayam, dan sawahnya dijual untuk membekali Anda yang sedang menuntut ilmu.

### 3. *Motif cinta*

Anda akan menjadi agresif, kesepian, frustrasi—bahkan bunuh diri, bila kebutuhan kasih sayang Anda tidak terpenuhi. Ketidakterpenuhan kasih sayang akan mengakibatkan perilaku Anda yang kurang baik. Kehangatan persahabatan dan perhatian yang tulus sangat Anda butuhkan, *kan?* Dicintai dan mencintai adalah keinginan yang pasti ada dalam diri Anda, apapun keadaan fisik Anda.

### 4. *Motif harga diri*

Kehadiran Anda di dunia ingin sekali diperhitungkan oleh orang lain, *kan?* Siapapun orangnya pasti memiliki keinginan ini, baik Anda seorang ustad atau pegawai pabrik. Politikus yang berteriak di atas podium sambil mengobral janji palsu adalah karena ia ingin mendapat penghargaan yang tersimbolkan dengan menduduki kursi parlemen. Seorang penyanyi dangdut yang menggoyangkan pinggulnya hingga *keseleo* adalah karena ingin dihargai orang lain.

Di sebuah pinggiran kota di London pada 2003 ada seorang siswa SMU yang mencoba melewati tumpukan bata cukup tinggi dengan sepeda kumbangnya. Dia memasang kamera mini di pinggir tumpukan bata tersebut. Anak itu tidak sukses dalam pelintasannya dan tersungkur. Sepedanya terpental jauh dan dia jatuh terkapar. Ketika ditanya oleh seorang wartawan alasan dirinya membuat atraksi seperti itu, sambil meringis kesakitan dia menjawab, “Karena aku ingin memperlihatkan



kepada anak-anak perempuan di kelasku bahwa diriku laki-laki pembe-rani yang pantas dikagumi. Selama ini mereka menyebutku penakut.”

Demikian, komponen afektif yang berupa motif sosiogenis. Kom-ponen afektif selanjutnya adalah sikap. Sherif dan Sherif (1956) menganggap sikap sebagai motif sosiogenis yang diperoleh melalui proses belajar. Sedangkan, Allport (1924) memandang bahwa sikap merupakan kesiapan saraf sebelum memberikan respons. Dalam pengertian Allport, sikap bukan perilaku. Tapi, ia adalah kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap bisa berupa benda, manusia, tempat, gagasan, atau kelompok. Sikap tidak berdiri sendiri. Ia memerlukan objek. Anda menyatakan bahwa sikap saya baik. Pasti, saya akan bertanya, “Sikap terhadap apa atau siapa?”

Dalam pengertian sosial, sikap terkadang ditukargulingkan dengan perilaku. Kemudian, sikap bukan sekadar rekaman masa lalu. Ia memiliki daya dorong. Sikap mendorong seseorang untuk menentukan apakah harus pro atau kontra terhadap suatu masalah. Sikap mendorong seseorang untuk mengesampingkan atau menghindari suatu perkara. Sikap menentukan manusia untuk menyenangi atau membenci suatu objek. Sikap timbul dari pengalaman. Ia tidak menempel pada diri manusia sejak lahir, melainkan hasil proses belajar. Oleh karena itu, sikap dapat diperteguh dan sekaligus dapat diubah.

Komponen afektif yang terakhir adalah emosi. Emosi adalah kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran.

Ketika seseorang dicemoohkan oleh orang lain, dia akan segera bereaksi secara emosional karena dia sadar terhadap arti cemoohan itu.

Coleman dan Hammen, sebagaimana disebutkan oleh Jalaluddin Rakhmat (1996), menyebutkan empat fungsi emosi. *Pertama*, emosi adalah pembangkit energi. Tanpa emosi Anda tidak sadar atau mati. Secara mendasar, hidup adalah merasa, mengalami, bereaksi, dan bertindak. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi Anda. Marah menggerakkan Anda untuk menyerang. Takut menggerakkan Anda untuk lari. Cinta menggerakkan Anda untuk mendekat dan bermesraan. *Kedua*, emosi adalah pembawa informasi. Keadaan diri Anda diketahui melalui emosi. Jika marah pada seseorang, Anda mengetahui bahwa orang yang bersangkutan mengganjal Anda. Kalau sedih, berarti Anda kehilangan sesuatu yang disayangi. *Ketiga*, emosi adalah pembawa pesan. Seorang pengajar yang menyertakan seluruh emosinya dalam mengajar diyakini oleh beberapa peneliti akan lebih dinamis dan meyakinkan. *Keempat*, emosi adalah sumber informasi tentang keberhasilan Anda. Ketika mencari keindahan, Anda akan mengetahui keberhasilannya saat Anda merasakan kenikmatan estetis dalam jiwa Anda.

Emosi berbeda-beda dalam hal lama dan intensitasnya. Dalam hal lamanya, emosi ada yang berlangsung singkat dan ada yang berlangsung lama. *Mood* adalah emosi yang menetap selama berjam-jam atau beberapa hari. *Mood*, memengaruhi persepsi seseorang pada stimuli yang merangsang alat indriawinya. *Mood* merupakan suasana emosional. Bila suasana emosional ini menjadi kronis dan menjadi bagian struktur kepribadian seseorang, oleh para ilmuwan disebut *temperamen*.

Pemarah, ceria, dan penyedih adalah istilah yang digunakan untuk menyebut temperamen.

### **Faktor Situasional**

Jose Delgado (1969), disebutkan oleh Packard (1978), menyatakan bahwa respons otak sangat dipengaruhi oleh suasana. Pernyataan Delgado ini disampaikan olehnya setelah dia melakukan eksperimen terhadap kera-kera Gibbon yang menjadi agresif. Padahal, sebelumnya kera-kera Gibbon adalah kera yang tenang dan sedikit pendiam. Delgado mencoba merangsang salah satu bagian otaknya. Ketika dirangsang, seekor kera menyerang kera asing yang tinggal dalam satu kandang. Tetapi, dengan rangsangan yang sama, kera tersebut tidak menampilkan sikap bermusuhan terhadap kawan betinanya, (Rakhmat, 1996: 44).

Banyak sekali faktor-faktor situasional yang dapat memengaruhi perilaku Anda. Edwar G. Sampson (Rakhmat, 1996: 44) merangkum seluruh faktor situasional. *Pertama*, aspek-aspek objektif dari lingkungan, seperti faktor ekologis, faktor desain dan arsitektural, faktor temporal, analisis suasana perilaku, faktor teknologi, dan faktor sosial. *Kedua*, lingkungan psikososial, seperti iklim organisasi, etos, iklim institusional, dan kultural. *Ketiga*, stimuli yang mendorong dan meneguhkan perilaku, seperti orang lain dan situasi pendorong perilaku.

### ***Faktor Ekologis***

Faktor ekologis adalah keadaan alam yang melingkupi manusia. Keadaan alam memengaruhi gaya hidup dan perilaku manusia. Pandangan ini dipegang oleh kaum determinisme lingkungan. Banyak orang yang menghubungkan keadaan malas kelompok tertentu dengan mata

pencaharian bertani dan keadaan cuaca yang adem. Cuaca yang adem mendorong orang semangat untuk tidur dan malas untuk bekerja.

Beberapa pandangan kaum determenisme lingkungan telah banyak diuji dalam berbagai penelitian. Di antaranya pandangan mereka tentang efek temperatur cuaca pada tindakan kekerasan, perilaku interpersonal, dan suasana emosional. Yang belum diteliti dari pandangan mereka adalah pengaruh temperatur ruangan pada efektifitas belajar-mengajar.

### ***Faktor Arsitektural***

Para ahli psikologi arsitektur menemukan bahwa rancangan dan bentuk bangunan memengaruhi perilaku penghuninya. Sebuah restaurant yang dirancang dengan pola arsitektur tertentu dapat memengaruhi semangat makan para tamu yang datang. Satu rancangan arsitektur dapat memengaruhi pola belajar di antara orang yang ada dalam bangunan sekolah tertentu. Tata letak meja dan kursi belajar diyakini oleh sebagian orang berpengaruh terhadap semangat belajar dan konsentrasi di saat menyimak pelajaran. Bahkan, warna cat dinding pun ditemukan memengaruhi terhadap ketenangan siswa dalam belajar.

### ***Faktor temporal***

C. Panati (1988), dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat (1996), menyebutkan bahwa waktu memengaruhi bioritma manusia. Dari tengah malam hingga pukul 4 pagi fungsi tubuh manusia berada pada tahap paling rendah sementara pendengaran sangat tajam. Pada pukul 10 siang konsentrasi dan daya ingat seseorang mencapai puncaknya. Sementara itu, pada pukul 3 sore kemampuan analisis dan kreativitas seseorang berada dalam puncaknya. Walaupun masih dapat didiskusikan contoh

ini, Anda sebagai guru atau dosen dapat mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Panati di atas.

### ***Faktor Teknologi***

Revolusi teknologi sering disusul dengan revolusi dalam perilaku sosial. Pola-pola teknologi yang menghasilkan berbagai loncatan membentuk serangkaian perilaku manusia. Bahkan, sebagian psikolog meyakini teknologi dapat memengaruhi suasana kejiwaan setiap anggota masyarakat.

Teknologi pendidikan yang menjamur saat ini memengaruhi beberapa perilaku siswa termasuk tingkat penguasaan informasi. Kehadiran teknologi dunia maya (virtual) telah membawa perubahan yang tidak kecil terhadap psikososial manusia pendidikan. Tidak jarang para siswa yang mengalami perubahan secara psikis akibat ledakan teknologi dunia maya yang kini telah menyatroni kamar setiap orang.

### ***Lingkungan***

Margareth Mead (1928) seorang penganut aliran determinisme lingkungan menunjukkan kepada kita bagaimana nilai-nilai yang diserap oleh anak pada waktu kecil memengaruhi perilakunya di kemudian hari. Anak kecil yang dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang patuh pada aturan agama berperilaku seperti orangtuanya di waktu yang akan datang. Seorang anak yang dibesarkan oleh seorang guru yang keras akan memiliki karakter seperti gurunya di kemudian hari. Anak ini menyerap nilai-nilai yang dibawa oleh gurunya tersebut. Tidak jarang beberapa santri yang belajar ilmu agama di hadapan seorang kyai yang sangat disegani kurang dapat menyerap pelajaran daripada santri yang

disuruh oleh sang kyai untuk mencangkul dan mengembalikan kambing di sekitar pesantren. Di sela-sela mencangkul dan mengembalikan kambing, sang santri tersebut dapat menyimak pelajaran yang disampaikan oleh kyai. Dan, ternyata santri tukang mencangkul itulah—dalam mitologi kaum santri—yang menjadi kyai besar. Tampaknya, suasana dia yang belajar dalam keadaan tidak tertekan dan bebas dari ketakutan pada muka sang kyai membawa dirinya mudah mendengar apa yang dikatakan oleh sang kyai.

### **B. Disonansi Kognitif**

Secara umum, pendidikan ilmu politik menimbulkan harapan yang tinggi terhadap partisipasi politik generasi muda. Diasumsikan bahwa pendidikan politik akan membantu mempersiapkan pra mahasiswa untuk peran masa depan mereka sebagai warga negara di masyarakat.<sup>4</sup> Pendidikan politik diasumsikan berefek untuk mengubah gelombang penurunan tingkat partisipasi politik di antara kelompok usia muda, serta pengembangan sikap dan perilaku demokratis.

Penelitian yang ada pada kemandirian politik telah berfokus pada perbedaan antara responden survei di negara-negara demokratis, di mana studi oleh Abramson adalah yang paling representatif. Abramson menemukan bahwa kemandirian anak-anak Afrika-Amerika secara signifikan lebih rendah daripada anak-anak kulit putih Amerika; dan

---

<sup>4</sup> Dassonneville, R., Quintelier, E., Hooghe, M., & Claes, E. (2012). The Relation Between Civic Education and Political Attitudes and Behavior: A Two-Year Panel Study Among Belgian Late Adolescents. *Applied Developmental Science, 16*(3), 140–150. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2051/10.1080/10888691.2012.695265>

temuan ini disebabkan oleh perbedaan dalam pendidikan politik mereka, perampasan sosial, kecerdasan, dan realitas politik. Berbeda dengan penelitian Abramson, penelitian ini berfokus pada siswa dari negara otoriter untuk mengeksplorasi pengaruh belajar di negara demokratis. negara pada kemandirian politik eksternal mereka. Menurut perspektif disonansi kognitif, faktor-faktor seperti peringkat pada prestasi politik pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, dan frekuensi dan subyek diskusi politik diusulkan. Orang-orang Cina, sebagai contoh, menunjukkan kesadaran nasional tertinggi di seluruh dunia. Namun, tinggal di Taiwan dapat memungkinkan mahasiswa Cina untuk menemukan “Cina lain” melalui mata orang-orang Taiwan, yang dapat memengaruhi kognisi yang ada dan menyebabkan disonansi kognitif.

Kognisi mengacu pada standar atau harapan, kata Abramson, seperti nilai, kepercayaan, sikap, atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan keberadaan disonansi. Teori disonansi kognitif mengasumsikan bahwa manusia cenderung mencari konsistensi, dan kemungkinan inkonsistensi antara berbagai kognitif elemen-elemen dapat menyebabkan disonansi kognitif. Salah satu topik paling umum yang menghasilkan disonansi kognitif di kalangan siswa Cina yang belajar di Taiwan adalah kebijakan *One-China*. Siswa-siswa Cina yang belajar di Taiwan sebelumnya cenderung menganggap Republik Rakyat Tiongkok (RRC) sebagai “ibu pertiwi besar,” di mana Taiwan menjadi bagiannya. Namun, setelah belajar di Taiwan, mereka menemukan bahwa kebanyakan orang Taiwan tidak hanya membantah ini tetapi juga memiliki pandangan negatif tentang RRC. Dalam penelitian ini, disonansi

kognitif yang diamati oleh Abramson, di antara siswa Cina yang belajar di Taiwan, mengacu pada perbedaan antara kognisi subyektif mereka dan fakta obyektif mengenai sejauh mana pemerintah Cina menanggapi kebutuhan masyarakat.

Menurut Abramson, mengurangi disonansi kognitif dapat melibatkan tiga model. *Pertama*, model konsistensi diri yang menggambarkan bagaimana sikap seseorang disesuaikan agar konsisten dengan lingkungan. *Kedua*, model penegasan diri yang menunjukkan upaya dalam mengubah lingkungan untuk membenarkan kognisi seseorang. *Ketiga*, model tampilan baru berkaitan dengan pengenalan kognisi baru.

Setelah belajar di Taiwan, beberapa mahasiswa Cina beradaptasi dengan lingkungan yang mengubah sikap mereka. Mereka mengakui bahwa cara pemerintah China merespons kebutuhan masyarakat sangat tidak diinginkan. Perilaku ini dapat dilihat sebagai hasil dari pilihan rasional. Mahasiswa Cina lainnya berusaha mengubah lingkungan untuk membenarkan kognisi mereka, bersikeras bahwa pemerintah Cina menanggapi kebutuhan masyarakat lebih tinggi dari yang diharapkan. Pandangan terakhir ini merupakan hasil dari meningkatnya kepercayaan politik yang ditempa oleh tingkat identifikasi sosial yang tinggi. Masih ada siswa Tionghoa lain yang meningkatkan kesadaran mereka, mempelajari ide-ide orang lain melalui diskusi politik; terlepas dari apakah mereka mengubah atau mempertahankan sikap asli mereka, hasil akhirnya dapat dipandang sebagai disebabkan oleh pembelajaran politik melalui sosialisasi politik.



### C. Telaah Penelitian Terdahulu

Relasi pengetahuan dan perilaku, terutama pada disiplin ilmu politik, menjadi perhatian banyak peneliti. Dassonneville et.al. (2012) meneliti tentang hubungan pengetahuan kewarganegaraan dengan sikap dan perilaku politik mahasiswa di Belgia. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum upaya pendidikan kewarganegaraan memiliki efek positif pada sikap politik dan perilaku remaja dan dewasa muda di Belgia. Dassonneville membedakan antara pendidikan formal sipil, iklim kelas terbuka, dan strategi pembelajaran aktif, dan hubungannya dengan partisipasi. Pendidikan formal kewarganegaraan (dalam bentuk instruksi kelas) dan strategi pembelajaran aktif memiliki relasi positif dengan sikap dan perilaku politik. Sementara itu, iklim kelas yang terbuka, di sisi lain, terkait secara signifikan dengan kepercayaan politik.<sup>5</sup>

Persson (2013) meneliti korelasi antara jumlah pemilih terlibat pada kegiatan politik dengan tingkat pendidikan. Di sebagian besar negara Barat, tingkat pendidikan tidak menyebabkan peningkatan jumlah pemilih pada tingkat agregat. Berdasarkan telaah pada model pendidikan relatif (nonformal) ditemukan sebuah penjelasan bahwa pendidikan hanya proxy untuk status sosial dan tidak memiliki efek

---

<sup>5</sup> Ruth Dassonneville, Ellen Quintelier, Marc Hooghe & Ellen Claes (2012) The Relation Between Civic Education and Political Attitudes and Behavior: A Two-Year Panel Study Among Belgian Late Adolescents, *Applied Developmental Science*, 16:3, 140-150, DOI: [10.1080/10888691.2012.695265](https://doi.org/10.1080/10888691.2012.695265)

kausal langsung. Sementara itu, pendidikan relatif memiliki efek yang jauh lebih besar pada jumlah pemilih dari pendidikan mutlak (formal).<sup>6</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Esaiasson dan Persson (2014), yang menyimpulkan bahwa terjadi relasi positif antara pengetahuan politik dengan tindakan para mahasiswa yang mempelajarinya, terutama bagi mahasiswa ilmu politik.<sup>7</sup> Penelitian ini membantah secara langsung terhadap teori perilaku terencana yang menganggap bahwa pengetahuan tidak memiliki korelasi dengan perilaku. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa para mahasiswa yang mempelajari ilmu politik lebih terpengaruhi dalam perilaku politiknya dibanding para mahasiswa hukum dan komunikasi.

Relasi pengetahuan dan sikap politik diteliti juga oleh Longo et.al. (2006). Melalui teknik wawancara, Longo menemukan bahwa menurut para mahasiswa yang dijadikan responden, kompetensi politik terbaik hanya dapat diperoleh melalui praktik demokrasi. Penelitian Longo merekomendasikan agar memperluas pemahaman tentang politik nonelektoral, jika ingin menarik orang-orang muda terlibat secara politik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mikael Persson (2013) Is the Effect of Education on Voter Turnout Absolute or Relative? A Multi-level Analysis of 37 Countries, *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 23:2, 111-133, DOI: [10.1080/17457289.2012.747530](https://doi.org/10.1080/17457289.2012.747530)

<sup>7</sup> Peter Esaiasson & Mikael Persson (2014) Does Studying Political Science Affect Civic Attitudes?: A Panel Comparison of Students of Politics, Law, and Mass Communication, *Journal of Political Science Education*, 10:4, 375-385, DOI: [10.1080/15512169.2014.948118](https://doi.org/10.1080/15512169.2014.948118)

<sup>8</sup> Nicholas V. Longo, Christopher Drury & Richard M. Battistoni (2006) Catalyzing Political Engagement: Lessons for Civic Educators from the Voices of Students,

Dominguez et.al. (2017) meneliti hubungan jurusan ilmu politik dengan minat kompetisi politik para mahasiswa. Penelitian tersebut berbasis pada hipotesis bahwa mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu politik lebih tertarik pada kompetisi politik dibanding yang lain dan lebih bersedia untuk terlibat dalam tindakan politik daripada kelompok lainnya yang belum mempelajarinya. Melalui studi terhadap 1.083 sarjana di dua universitas (Universitas Layola Marymount dan San Diego) yang berbeda, Dominguez et.al. menemukan bahwa para mahasiswa ilmu politik yang lebih senior memiliki ketertarikan yang lebih tinggi daripada kelompok mahasiswa baru dan lebih bersedia bergabung dengan kelompok terorganisir.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu tersimpulkan bahwa secara umum pengetahuan politik memiliki relasi positif dengan keterlibatan mereka yang mempelajarinya pada isu politik dan aktivitasnya. Para mahasiswa jurusan ilmu politik disimpulkan bahwa mereka lebih tertarik minat pada urusan-urusan politik dibanding dengan mereka yang bukan mahasiswa ilmu politik.

Apakah penelitian Persson dan lain-lain di atas dapat mengonfirmasi para mahasiswa ilmu politik, hukum, komunikasi, dan studi Islam di universitas Islam negeri di Indonesia, sehingga memiliki tipe yang sama dengan hasil penelitian-penelitian tersebut? Terdapat fakta dari hasil polling online bahwa para mahasiswa studi Islam lebih tertarik dan semangat pada pembahasan isu-isu politik di Indonesia.

---

Journal of Political Science Education, 2:3, 313-329, DOI: [10.1080/15512160600840483](https://doi.org/10.1080/15512160600840483)

<sup>9</sup> Casey B. K. Dominguez, Keith W. Smith & J. Michael Williams (2017) The Effects of Majoring in Political Science on Political Efficacy, Journal of Political Science Education, 13:1, 62-74, DOI: [10.1080/15512169.2016.1182439](https://doi.org/10.1080/15512169.2016.1182439)

Terdapat variabel penting yang memengaruhi mereka dan perlu untuk ditelaah. Variabel tersebut mungkin di antaranya adalah lingkungan dan norma subjektif, sebagaimana terkemuka dalam teori perilaku terencana.

5

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Partisipasi pada Perkuliahan Ilmu Politik**

Secara mayoritas, para responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini mengikuti perkuliahan ilmu politik, baik mahasiswa program studi ilmu politik, hukum, maupun ilmu komunikasi. Ditemukan data yang cukup signifikan di kalangan responden UIN Jakarta, yaitu partisipasi mahasiswa komunikasi lebih tinggi dibanding mahasiswa ilmu hukum. Hasil polling menunjukkan bahwa 72% mahasiswa komunikasi mengikuti perkuliahan ilmu politik, sedangkan para responden yang disurvei dari kalangan mahasiswa hukum persentasenya berada di bawah Ilmu Komunikasi, yaitu 63%. Alasan yang ditemukan menunjukkan bahwa para mahasiswa hukum menganggap ilmu politik tidak sesuai dengan realitas yang terjadi, yaitu penyimpangan politik. Sebagian responden mahasiswa ilmu hukum memandang secara ironi pada ilmu politik, sehingga berefek pada keterlibatan mereka dalam mengikuti perkuliahan ilmu politik.

Kecenderungan yang sama adalah terjadi di kalangan mahasiswa Ilmu Hukum UIN Bandung, hanya 24% responden yang mengikuti perkuliahan ilmu politik, berbeda jauh dengan mahasiswa komunikasi yang secara keseluruhan mengikuti perkuliahan ilmu politik. Begitu halnya dengan mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jogjakarta, yang lebih rendah lagi persentasenya dibanding para responden di UIN Bandung.

Hal ini menunjukkan tingkat minat yang sangat rendah pada ilmu politik di kalangan mahasiswa Ilmu Hukum.

Sementara itu, mahasiswa komunikasi lebih tinggi prosentasenya dibanding ilmu hukum, karena mereka memandang politik dari sisi komunikasi, sehingga kegiatan politik merupakan kegiatan komunikasi. Bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi, komunikasi publik yang memiliki daya tarik tinggi adalah komunikasi politik. Mayoritas responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi tidak memandang secara ironi pada ilmu politik, karena mereka tidak melihat dari sisi keharusan normatif melainkan lebih memandang dari sisi proses komunikasi dalam sebuah realitas sosial.<sup>10</sup>

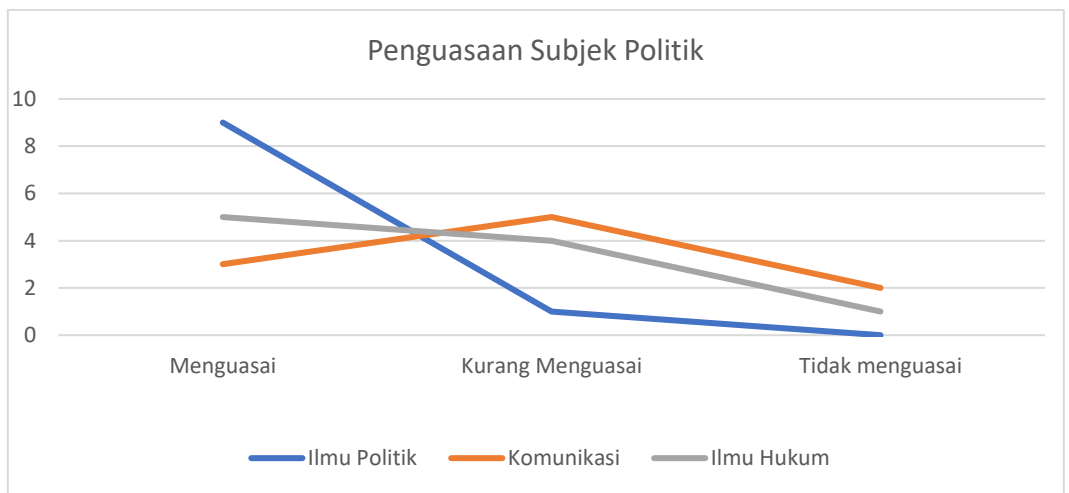


---

<sup>10</sup> Soukup, P. A., S.J. (2014). Political Communication. *Communication Research Trends*, 33(2), 3-43. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1550514483?accountid=38628>

Keterlibatan para mahasiswa komunikasi pada perkuliahan politik tidak sebanding lurus dengan penguasaan pada materi politik. Penguasaan para mahasiswa komunikasi pada dimensi ilmu politik lebih rendah dibanding para mahasiswa ilmu hukum. Diperkirakan irisan subjek-subjek pengetahuan dalam ilmu hukum sangat dekat, berbeda jauh dengan irisan subjek ilmu politik dengan ilmu komunikasi. Para responden dari kalangan ilmu komunikasi hanya menguasai 5 subjek ilmu politik dari 10 subjek yang ditanyakan, sedangkan mahasiswa hukum rata-rata menguasai 8 subjek dari 10 subjek yang ditanyakan. Kecenderungan data ini ditemukan sama di UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Yogyakarta.

Berbeda ketika responden diambil dari kalangan mahasiswa Ilmu Politik di UIN Bandung dan UIN Jakarta. Semua responden menyatakan terlibat dalam perkuliahan ilmu politik, karena ilmu politik merupakan identitas melekat pada status dan kedudukan mereka sebagai mahasiswa program studi ilmu politik. Dalam hal penguasaan subjek pengetahuan politik para mahasiswa ilmu politik menguasai dengan level tinggi, sehingga hampir rata-rata mereka menguasai 10 subjek ilmu politik yang ditanyakan.



Terjadi penguasaan yang merata dalam hal penguasaan subjek ilmu politik, yaitu dalam subjek demokrasi. Rata-rata para responden mengetahui teori-teori yang berkaitan demokrasi dan tokoh-tokoh terkait. Sementara itu, subjek ilmu politik yang kurang dikuasai oleh para responden terkait dengan tema-tema hubungan internasional. Hal ini memotret responden yang kurang menguasai isu-isu internasional, seperti teori-teori diplomatik, suaka politik, dan beberapa tema hubungan internasional lainnya.

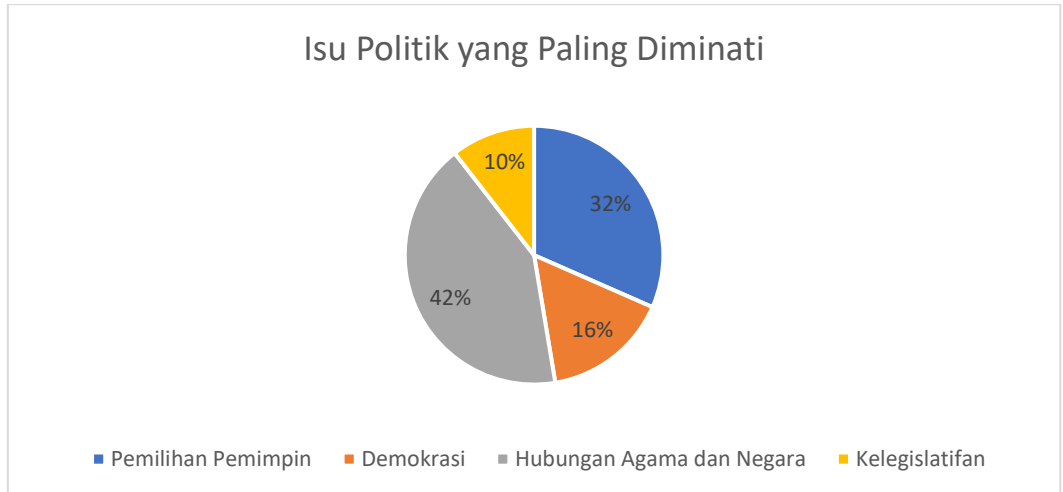
### **B. Isu Politik yang Diminati**

Sejumlah isu politik ditanyakan kepada para responden di tiga perguruan tinggi Islam negeri kelas atas di Indonesia. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah isu tentang pemilihan pemimpin, demokrasi, hubungan agama dan negara, dan kelegislatifan.

Dari sejumlah isu yang diangkat dan ditanyakan kepada responden, isu hubungan agama dan negara sangat diminati oleh para responden. Sementara itu, isu pemilihan pemimpin menempati urutan



isu politik yang paling diminati, dan disusul oleh isu demokrasi dan kelegislatifan secara berurutan di bawahnya.



Pilihan terbesar para responden terhadap isu hubungan agama dan negara dikarenakan secara kultural mereka berada pada sistem pendidikan yang berhubungan dengan agama. Identitas melekat mereka memengaruhi sikap, pola pandang, dan minat pada isu-isu politik yang berkembang. Dari 30 responden yang disurvei 24 responden (42%) tertarik dengan isu hubungan agama dan negara, baik secara teoretik dan praktik. Sementara itu, isu demokrasi tidak terlalu diminati oleh para responden, hanya dipilih oleh 16% responden atau sebanyak 9 orang dari 30 orang yang disurvei. Sedangkan, isu kelegislatifan, baik konsep maupun praktik, diminati lebih rendah lagi, yaitu hanya 6 (10%) orang yang menyatakan tertarik.

Ketertarikan mayoritas responden terhadap hubungan agama dan negara merupakan kode bahwa isu agama masih sangat sensitif di kalangan para mahasiswa dan juga di masyarakat secara umum. Bukan

sekadar di negara-negara berkembang, di negara-negara modern yang telah lebih maju isu agama masih merupakan isu sensitif dan jadi perhatian besar.<sup>11</sup>

Walaupun peran agama mengalami kemunduran yang sangat drastis di kalangan masyarakat modern, terutama di beberapa negara di Erofa Barat, isu hubungannya dengan negara tetap menjadi perhatian masyarakat. Di Swedia, sebagai contoh, agama mengalami kemunduran peran luar biasa di masyarakat namun tetap isu-isunya masih menjadi perhatian masyarakat.<sup>12</sup> Adapun di Turki, diskursus agama dan negara tidak mengalami penyusutan sama sekali dari zaman Turki klasik hingga Turki modern dan saat ini.<sup>13</sup>

Isu demokrasi tidak menjadi perhatian khusus dan besar di kalangan para responden, terkalahkan oleh isu pemilihan pemimpin. Ini merupakan sinyal bahwa promosi demokrasi mengalami hambatan kultural dan intelektual di kalangan para responden (mahasiswa hukum, komunikasi, dan politik) secara khusus dan di kalangan mahasiswa UIN secara keumuman. Minat para responden yang rendah terhadap isu-isu demokrasi menandakan bahwa demokrasi total masih mengalami

---

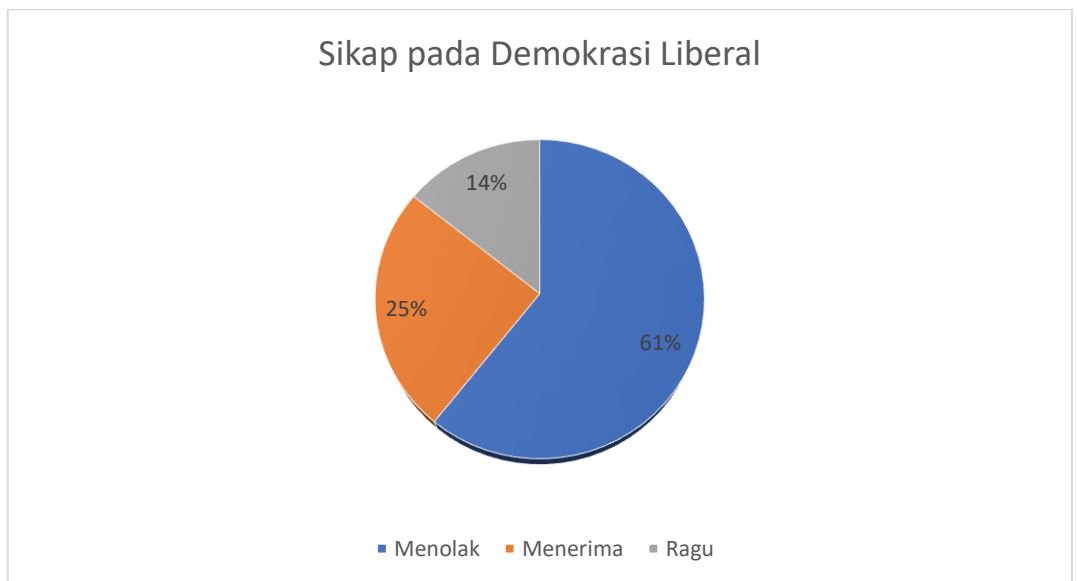
<sup>11</sup> Montague, P. (2004). Religious reasons and political debate. *Social Theory and Practice*, 30(3), 327-349. doi:<http://dx.doi.org/10.5840/soctheorpract200430316>

<sup>12</sup> Gustafsson, B. (1974). The Role of Religion in Modern Sweden: Religion as a Reference System Religion as a System Of Adaptation Table 1 Religion as an Integrative System Religion as an Affirmative System Religion as System of Innovation from Folk Religion to Personal Religiosity Discussion and Conclusion Table 2 Table 3. *The American Behavioral Scientist (Pre-1986)*, 17(6), 827. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/194650908?accountid=38628>

<sup>13</sup> Shukri, S. F. M., & Hossain, I. (2017). Political discourse and Islam: Role of rhetoric in Turkey. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 42(2), 157-179. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1922871897?accountid=38628>

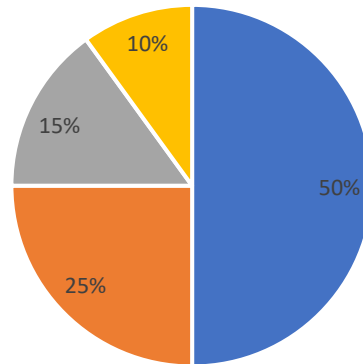
hambatan di kalangan para mahasiswa. Hasil dikusi dalam *focus group discussion* (FGD) dengan para responden tampak masih terjadi polemik dalam hal penerimaan demokrasi secara total, lebih-lebih terhadap demokrasi liberal.

Ketika para responden ditanya tentang penerimaan demokrasi liberal, sebanyak 17 responden menolak, 7 orang menerima, dan 6 orang menyatakan ragu-ragu.



Ketika para responden ditanya alasan para responden menolak terhadap demokrasi liberal, 10 responden menyatakan bertentangan dengan ajaran agama, 5 responden menjawab bertentangan dengan budaya, 3 responden menjawab bertentangan dengan falsafah bernegara (Pancasila), dan 2 responden menjawab tidak tahu atau ragu-ragu.

### Alasan Penolakan Demokrasi Liberal



■ Agama ■ Budaya ■ Pancasila ■ Tidak tahu

Alasan penolakan demokrasi liberal yang didasarkan pada agama sangat tinggi, yaitu mencapai setengah dari jumlah responden yang disurvei. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan harmonisasi agama dan demokrasi dalam di masyarakat, sehingga asumsi bahwa agama dan demokrasi bisa berdampingan hanya pada aspek tertentu, tidak untuk setiap aspek kehidupan sosial, sebagaimana diprediksi oleh sejumlah peneliti.<sup>14</sup>

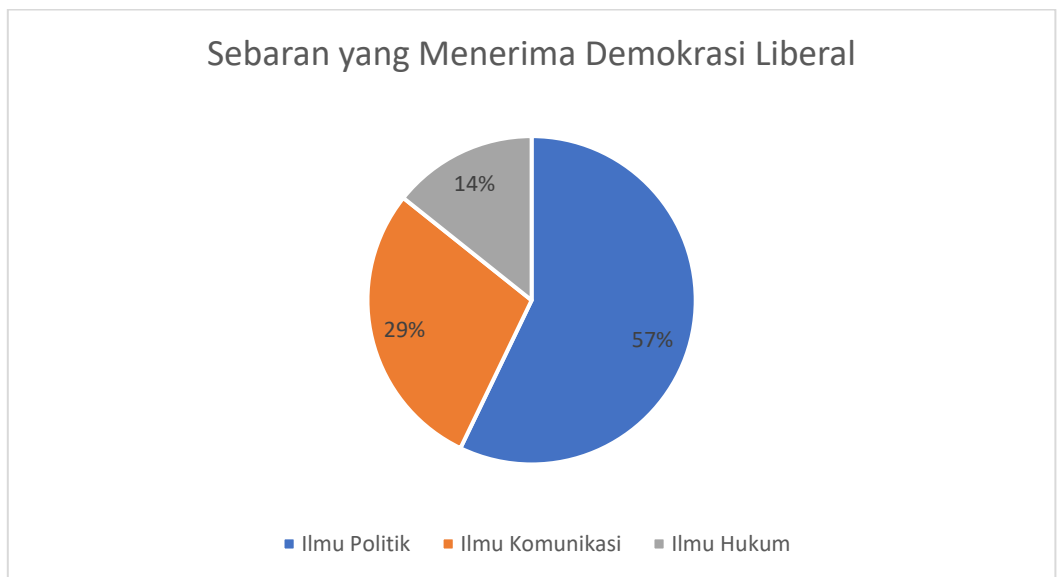
Secara umum, agama dan demokrasi mengalami hambatan untuk berdampingan, dikarenakan terdapat nilai yang tidak bisa dikompromikan. Agama mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk terbatas, sedangkan demokrasi mengajarkan bahwa manusia makhluk

---

<sup>14</sup> Noble, M. D. (2016). *Illuminating democracy: Trends, predictors, and outcomes of liberal democracy 1972-2013* (Order No. 10245531). Available from Sociology Database. (1855945179). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1855945179?accountid=38628>

bebas. Tentunya terjadi benturan prinsip, sebagaimana dipahami oleh keumuman responden dalam penelitian ini.

Terjadi perbedaan prosentase di antara para responden yang menerima demokrasi liberal. Para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Politik (sebanyak 4 orang) lebih tinggi dibanding dengan para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi (sebanyak 2 orang) dan Hukum (sebanyak 1 orang). Data ini menunjukkan bahwa responden yang menerima dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum lebih rendah dibanding mahasiswa Ilmu Komunikasi.



Berdasarkan data yang tersaji di atas dapat dianalisis bahwa pemikiran liberal dapat mudah berkembang di kalangan para mahasiswa ilmu politik, sedangkan mengalami hambatan apabila dikembangkan di kalangan mahasiswa Ilmu Hukum. Sementara itu, potensi pengembangan pemikiran liberal sedikit ada ruang di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi. Namun, data ini tidak dapat memotret

apakah pemikiran liberal akan bersesuaian dengan perilaku dan sikap liberal secara sosial, sebab belum tentu orang yang memiliki pemikiran liberal simetris dengan sikap dan tindakan yang liberal.<sup>15</sup>

Prosentase penolakan pada demokarsi liberal terjadi secara merata di kalangan mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Hukum di tiga UIN, dengan jumlah prosentase yang mendekati kesamaan, yaitu di sekitar 30%. Prosentase ini dapat memotret tipologi kampus tempat mereka mempelajari pengetahuan, sehingga pada umumnya kampus Universitas Islam Negeri menolak terhadap demokrasi liberal.

### **C. Peran Ilmu Politik bagi Kehidupan**

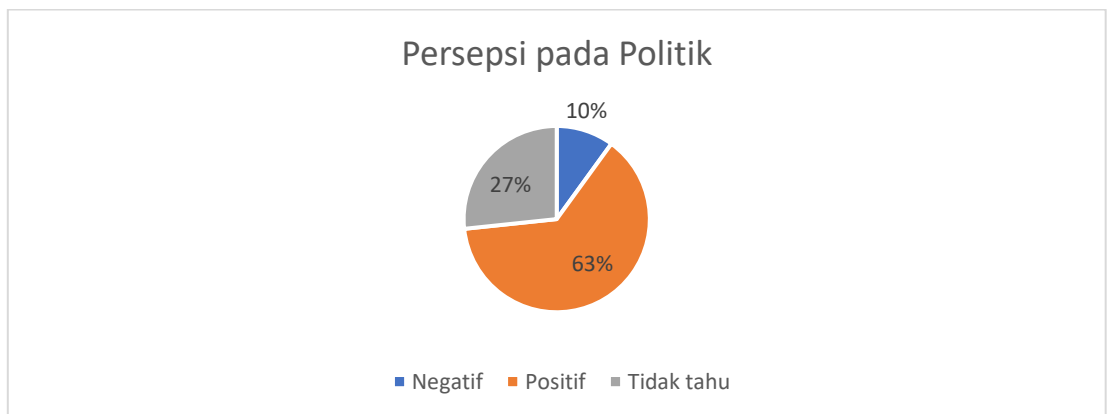
Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa secara umum masyarakat memandang politik secara positif untuk kehidupan manusia, karena dianggap sebagai pengetahuan yang luhur dan mulia. Secara instrinsik politik itu bernilai mulia, karena berisi ajaran tentang tata atur dan pengelolaan kekuasaan yang baik, namun secara ekstrinsik (faktor eksternal) politik dapat menjadi tidak bernilai. Beberapa faktor dan fenomena politik menimbulkan persepsi yang negatif terhadap politik. Kasus-kasus sosio-politik yang buruk menjadi dasar masyarakat memberikan pandangan negatif pada politik, bukan didasarkan pada hakikat politiknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Frohock, F. M. (1997). Conceptions of Persons. *Social Theory and Practice*, 23(1), 129-158. doi:<http://dx.doi.org/10.5840/soctheorpract19972317>

<sup>16</sup> Ilc, B. V. (2017). Racism and the Crises of Political Representation in the American Republic - from its Constitution to the Trump Phenomenon. *Teorija in Praksa*, 54(1),

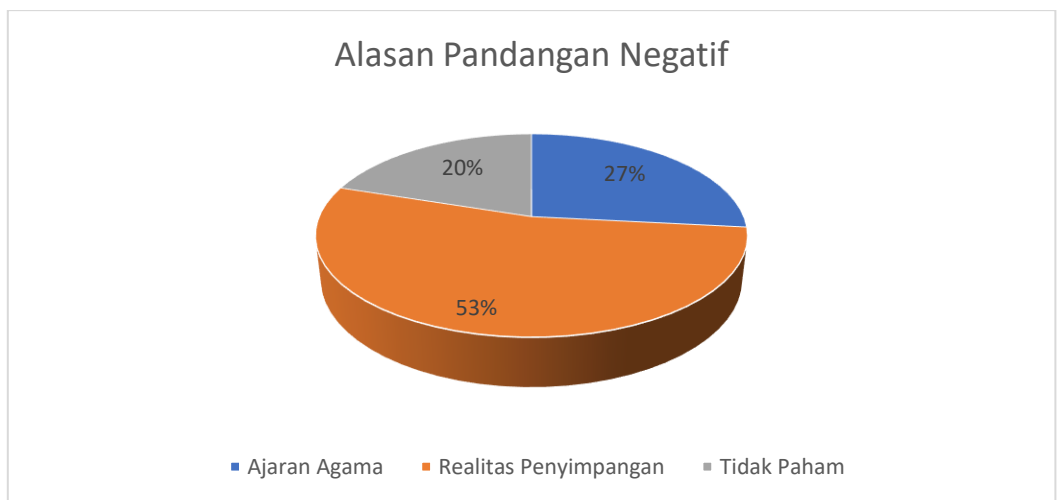
Berdasarkan hasil polling yang disebarakan kepada para mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Hukum, dan Ilmu Komunikasi di tiga Universitas Islam Negeri (Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta) ditemukan bahwa bahwa pandangan negatif terhadap politik mencapai 10%, sedangkan yang sikap tidak jelas atau ragu di kalangan mereka mencapai 27%. Sementara itu, 63% responden memandang secara positif terhadap politik. Para responden memandang bahwa politik penting untuk kehidupan, seperti halnya suprasutruktur sosial lainnya.



Prosentase pandangan positif tertinggi terjadi di kalangan mahasiswa Ilmu Politik, sedangkan terendah terjadi di kalangan mahasiswa Ilmu Hukum. Para mahasiswa Ilmu Hukum lebih bersikap negatif terhadap politik, dikarenakan fenomena penyimpangan yang diterjadi dalam kegiatan politik. Mahasiswa Ilmu Hukum kurang teloran terhadap realitas penyimpangan politik, sedangkan mahasiswa Ilmu Politik lebih toleran terhadap fenomena penyimpangan. Begitu halnya

dengan para mahasiswa Ilmu Komunikasi, mereka lebih tinggi toleransinya terhadap penyimpangan politiuik dibanding mahasiswa Ilmu Hukum. Dari

Sikap negatif terhadap politik terkait dengan efek sosial dari politik (8 orang), walaupun terdapat responden (5 orang) yang menghubungkan sikap negatif pada politik dengan doktrin agama (religiusitas) yang diajarkan oleh ulama otoritatif yang menyatakan bahwa politik adalah sumber keburukan. Sementara itu, beberapa responden (3 orang) menghubungkan pandangan negatifnya dengan ketidakpahaman mereka pada hakikat politik.



Persepsi negatif terhadap politik yang didasarkan pada agama memiliki hubungan dengan pandangan Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa seluruh isi politik adalah keburukan.<sup>17</sup> Sementara itu, pandangan negatif yang didasarkan pada realitas penyimpangan

---

<sup>17</sup> Jamal Al-Thalaqani, *Audzu min al-Syaithan wa al-Siyasah*, alnoor.se./article.asp?id=47967, diakses 10 Agustus 2019.



politik karena pengetahuan mereka tentang penyimpangan para politikus pada kekuasaan, berupa korupsi atau penyimpangan lainnya. Terkait dengan realitas penyimpangan, data yang ditemukan menunjukkan bahwa para responden memandang secara pesimis terhadap perilaku politisi, walaupun terjadi varian prosentase pandangan. Mahasiswa Ilmu Hukum lebih tinggi pesimisnya dibanding mahasiswa Ilmu Politik dan Komunikasi.



Berdasarkan data pada gambar di atas tampak bahwa secara umum, responden menunjukkan sikap pesimistis pada penyimpangan politik. Mereka menganggap bahwa keumuman politisi ditengerai melakukan penyimpangan, sehingga berefek pada pandangan yang

buruk mereka pada politik, bahkan bukan sekadar pada politik melainkan pada hal-hal lain yang berhubungan dengan politik.<sup>18</sup>

Beberapa data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pandangan para responden mengenai peran politik dalam kehidupan terhubung dengan fakta sosio politik yang terjadi. Secara objektif mereka memandang bahwa politik memiliki nilai guna bagi kehidupan manusia, namun penilaian tersebut menjadi redup seiring dengan kejadian-kejadian penyimpangan politik masif yang tersaksi melalui media atau secara langsung mereka temui.

#### **D. Kepekaan pada Perkembangan Politik**

Kalangan mahasiswa Ilmu Politik memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dibanding mahasiswa Ilmu Hukum dan Ilmu Komunikasi. Walaupun begitu, prosentase mereka yang kurang peka terhadap perkembangan politik cukup signifikan, yaitu mencapai 31% dari total responden yang disurvei.

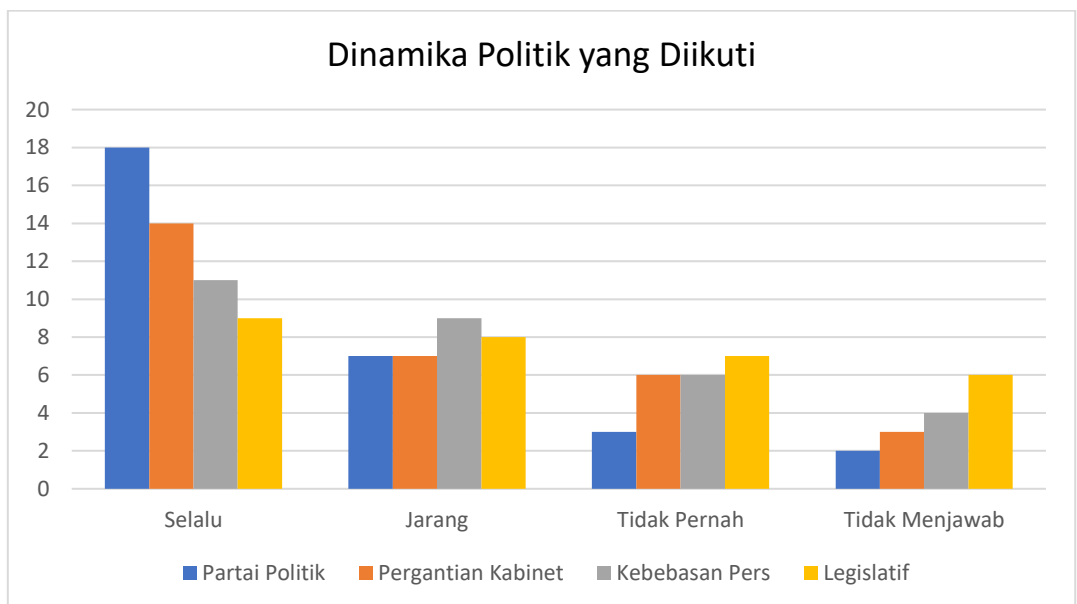
Adapun para responden dari kalangan Ilmu Hukum 55% jarang mengikuti perkembangan politik yang terjadi, 43 selalu mengikuti, dan sebanyak 2% sama sekali tidak pernah mengikuti. Data ini menunjukkan bahwa kejadian-kejadian politik tidak terlalu banyak diketahui oleh para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum, sehingga berefek terhadap literasi mereka pada tema-tema politik. Justeru, sebaliknya kepekaan pada perkembangan politik lebih kuat di kalangan responden

---

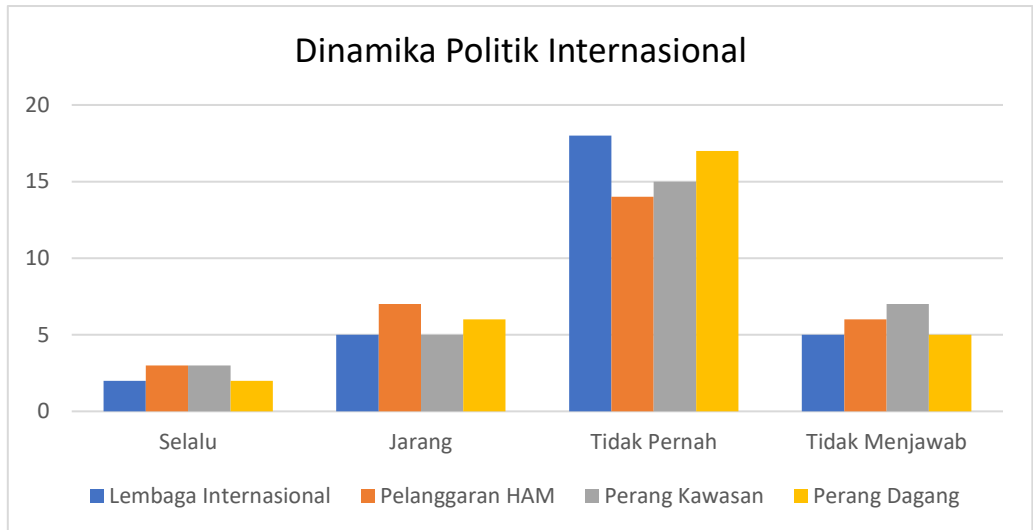
<sup>18</sup> Ceresola, R. (2016). *Political corruption and political engagement: A multilevel analysis investigating the effect of political corruption prosecutions on voting and government trust in the united states* (Order No. 10163430). Available from Sociology Database. (1830773693). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1830773693?accountid=38628>

Ilmu Komunikasi dibanding mahasiswa Ilmu Hukum, walaupun perbedaan persentasenya hanya terpaut 3%. Sebanyak 48% responden dari kalangan Ilmu Komunikasi selalu mengikuti perkembangan politik yang terjadi dan 52% menyatakan jarang.

Ketika para responden ditanya dengan materi perkembangan (dinamika) politik yang paling sering diikuti, responden menjawab secara beragam. Mayoritas responden menjawab bahwa yang paling sering diikuti adalah tentang partai politik (pergantian ketua umum dan penambahan partai), dan secara berurutan tingkat pergantian kabinet (reshuffle), kebebasan pers dalam memberitakan politik, dan dinamika di lembaga legislatif. Partai politik menjadi perhatian tinggi para responden terkait dengan momen munas, kongres, dan rapimnas. Para responden menganggap bahwa dalam beberapa momen tersebut selalu terjadi dinamika politik, selain karena faktor media masa yang menyiarkannya.



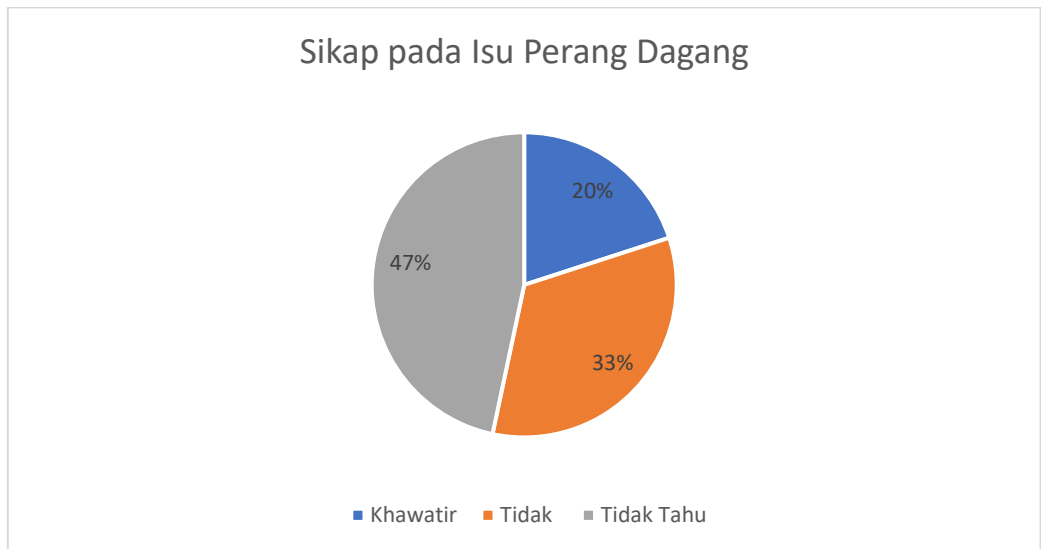
Kepekaan para responden yang paling rendah adalah terhadap isu-isu politik internasional. Jawaban para responden secara umum tidak pernah mengikuti perkembangan politik internasional, selain pada kasus Palestina. Perkembangan dan dinamika pada lembaga-lembaga internasional kontemporer sangat jarang diikuti.



Kasus-kasus politik internasional yang cukup menarik jadi perhatian responden, walaupun dalam jumlah sangat sedikit, adalah kasus perang dagang antara Amerika dan Cina, namun dari sisi substansi kasus para responden tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, seperti perang tarif dan penghentian impor/ekspor produk-produk tertentu dari dan ke dalam dua negara yang sedang berperang.<sup>19</sup> Para responden yang menjawab khawatir terhadap kasus perang dagang antara Amerika dan Cina lebih kecil daripada responden yang menjawab tidak khawatir dan tidak yakin akan berpengaruh besar terhadap

<sup>19</sup> Silver, A. (2018). US-china trade war rattles labs. *Nature*, 558(7711), 494-495. doi:<http://dx.doi.org/10.1038/d41586-018-05521-2>

perekonomian dalam negeri. Sementara itu, mayoritas responden tidak mengetahui akibat perang dagang, yang salah satunya adalah ketidakstabilan perdagangan kawasan dan terjadi ketimpangan fokus perdagangan internasional ke kawasan Timur Asia.<sup>20</sup>



Responden yang menyatakan tidak khawatir terhadap efek perang, yang mencapai 33%, karena apa yang sebenarnya terjadi jauh dari tempat tinggal mereka, terjadi di negara lain. Sedangkan, responden yang menjawab khawatir adalah dikarenakan mereka mendengar dari media akibat yang akan timbul dari perang dagang. Sementara itu, yang menjawab tidak tahu terhadap akibat perang dagang dikarenakan mereka tidak pernah mengetahui ada kasus perang dagang antar Cina dan Amerika.

---

<sup>20</sup> Park, J., & Stangarone, T. (2019). Trump's america first policy in global and historical perspectives: Implications for US–East asian trade. *Asian Perspective*, 43(1), 1-34. doi:<http://dx.doi.org/10.1353/apr.2019.0000>

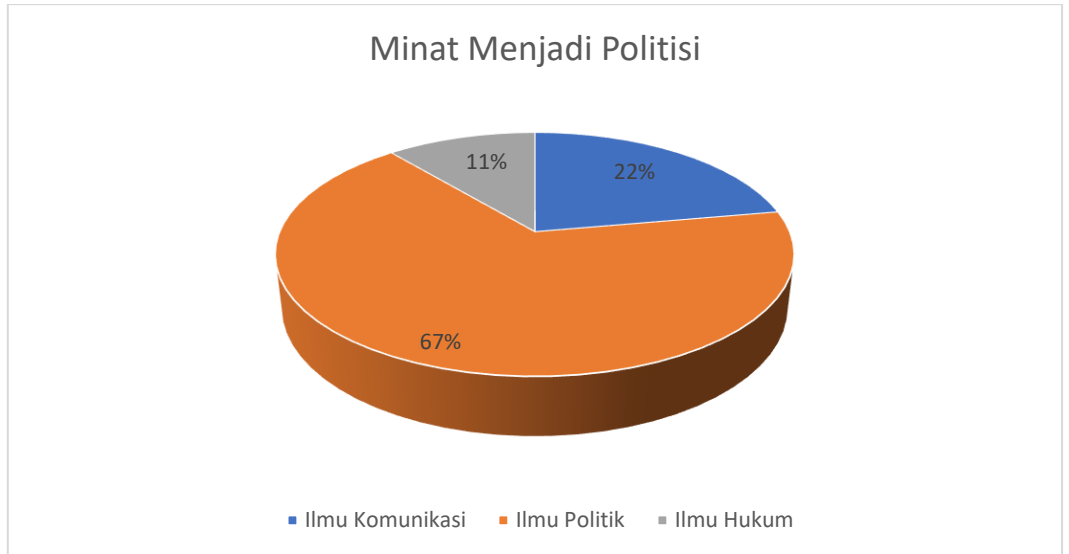
Data di atas terjadi secara merata di kalangan mahasiswa Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Politik di tiga UIN. Tidak terjadi perbedaan data yang mencolok di antara para responden, bahkan cenderung mirip. Hal ini menandakan bahwa literasi politik internasional sangat rendah di kalangan para responden, sehingga penting untuk penanganan khusus pada bidang tersebut, baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyusunan kurikulum ilmu politik.

#### **E. Minat pada Politik Praktis**

Terjadi perbedaan signifikan dalam hal minat para responden terhadap politik praktis. Sejumlah 33% responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi menjawab tertarik untuk menjadi politisi, 56% menyatakan tidak tertarik, dan 11% menyatakan tidak tahu. Sementara itu, responden dari kalangan Ilmu Hukum ketertarikan untuk menjadi politisi lebih rendah dibanding responden dari kalangan Ilmu Komunikasi. Para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum yang menjawab tertarik hanya 13%, sedangkan yang menjawab tidak tertarik mencapai 87%. Adapun para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Politik sebanyak 74% menjawab tertarik untuk menjadi politisi, 12% menjawab tidak, sedangkan sebanyak 14% menjawab ragu-ragu.

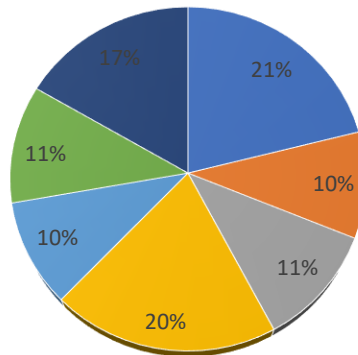
Ketika diakumulasi dari total responden di tiga Universitas Islam Negeri (UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Yogyakarta), para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Politik lebih besar persentasenya dibanding responden yang lainnya. Hal ini terkait dengan persentuhan

mereka dengan ilmu politik yang lebih intensif dibanding responden lainnya, sehingga membentuk kepribadian mereka.



Para responden ditanya beberapa profesi politik, di antaranya pengurus partai, anggota legislatif, relawan politik, pengamat, apar pemerintah, aktivitas LSM, jurnalis politik, dan pengajar politik. Dua profesi, yaitu anggota legislatif dan aparat pemerintah mendapatkan pilihan terbanyak dari para responden.

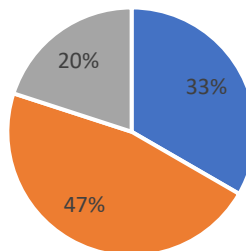
### Profesi Politik yang Diminati



- Anggota Legislatif
- Relawan Politik
- Pengamat
- Aparat Pemerintah
- Aktivist LSM
- Jurnalis Politik
- Pengajar Politik

Profesi politik yang paling rendah diminati para responden adalah menjadi relawan politik dan aktivis LSM dan pengajar politik. Pengajar politik lebih diminati oleh responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Politik, sedangkan peminat paling rendah adalah dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum.

### Profesi Pengajar Politik



- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Ilmu Hukum



Alasan para mahasiswa Ilmu Hukum tidak terlalu berminat menjadi pengajar politik adalah dikarenakan berhubungan dengan persepsi negatif mereka terhadap politik, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sedangkan, kalangan responden dari Ilmu Komunikasi cukup tinggi berminat untuk menjadi pengajar politik karena berhubungan dengan aktivitas komunikasi. Menurut mahasiswa Ilmu Komunikasi mengajarkan suatu pengetahuan pada dasarnya adalah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan dalam penyampaian pesan.<sup>21</sup>

Sebaran kecenderungan peminatan pada profesi politik praktis cenderung rata di tiga Universitas Islam Negeri (Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta), walaupun terjadi perbedaan prosentase namun yang tidak signifikan. Walaupun begitu, data yang ditemukan menunjukkan terjadi perbedaan yang agak mencolok dalam hal minat para mahasiswa Ilmu Hukum UIN Bandung dengan UIN Yogyakarta. Para mahasiswa Ilmu Hukum UIN Yogyakarta lebih tinggi minat menjadi anggota legislatif dibanding mahasiswa Ilmu Hukum UIN Bandung. Sedangkan, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta lebih tinggi dibanding kedua UIN yang lainnya.

---

<sup>21</sup> Soukup, P. A., S.J. (2014). Political Communication. *Communication Research Trends*, 33(2), 3-43. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1550514483?accountid=38628>



Kekurangminatan para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum UIN Bandung pada profesi anggota legislatif adalah terkait dengan tingginya minat mereka pada profesi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan polisi, walaupun terdapat beberapa responden yang menjawab lebih tertarik untuk menjadi tentara dan pengusaha. Pilihan pada profesi hukum mengalahkan pada profesi politik praktis, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sementara itu, responden dari kalangan Ilmu Komunikasi yang berminat pada politik praktis cukup tinggi dikarenakan mereka tidak memiliki wilayah profesi spesifik, karena komunikasi bisa masuk pada berbagai wilayah profesi.<sup>22</sup>

Sebagai sistem pengetahuan yang masuk pada berbagai wilayah profesi, para peminat ilmu komunikasi tidak memetakan secara spesifik pada wilayah apa dan mana. Mereka dapat mengembangkan sistem

---

<sup>22</sup> Yeger, H. (2015). The Eolution of Human Communication. *Journal of Cell Communication and Signaling*, 9(3), 289-290. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s12079-015-0286-6>

komunikasi pada kegiatan apapun, selama itu adalah sebuah proses saling kirimkan pesan.<sup>23</sup> Hasil riset ini pun memotret pandangan para mahasiswa Ilmu Komunikasi yang tidak terlalu memasalahkan jenis dan bentuk pekerjaan tertentu.

## **F. Hubungan Agama dan Negara**

Hubungan agama dan negara menjadi tema penting di negara-negara mayoritas Muslim, sehingga menjadi diskursus krusial dalam perdebatan ilmiah mereka. Hampir di setiap universitas di Indonesia perbincangan tentang hubungan agama dan negara mendapat perhatian dari para civitas akademiknya. Perbincangan hubungan antara agama dan negara belakangan ini mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama di banyak negara.<sup>24</sup>

Diskursus hubungan agama dan negara semakin kuat, ketika negara mengambil jarak yang netral dengan agama. Di negara-negara yang tidak netral secara agama, hubungan agama dan negara tidak menjadi tema krusial, seperti di negara-negara Arab Islam, begitu juga di negara-negara yang tidak menempatkan agama sebagai elemen sosial yang penting di masyarakat, seperti negara-negara Eropa Barat pada umumnya.

Berdasarkan hasil polling disebarkan kepada para responden, isu hubungan agama dan negara sangat diminati oleh para responden,

---

<sup>23</sup> Lacayo, V. (2013). *Communicating complexity: A complexity science approach to communication for social change* (Order No. 3671428). Available from Biological Science Collection. (1647184772). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1647184772?accountid=38628>

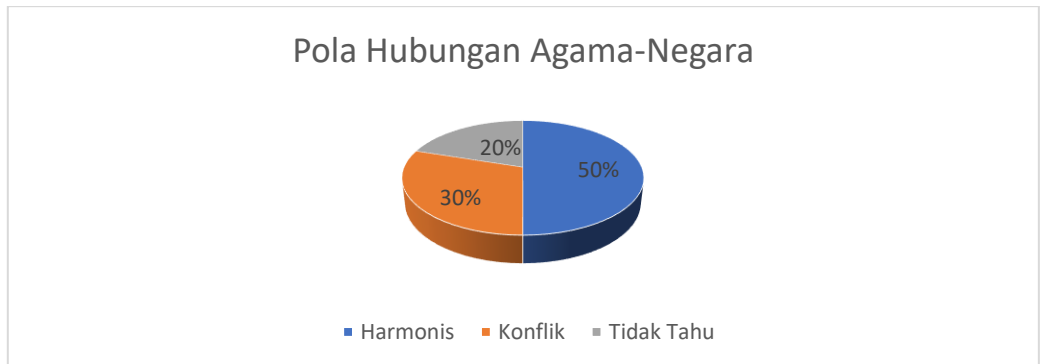
<sup>24</sup> Tsyrendorzhieva, D., & Bagaeva, K. (2016). *State-religious relations in modern russian society*. Les Ulis: EDP Sciences. doi:<http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162801103>

mencapai 44%, lebih tinggi dibanding minat mereka pada isu pemilihan pemimpin dan juga demokrasi. Para responden menganggap bahwa isu hubungan agama dan negara termasuk tema sensitif yang menyangkut sesuatu yang tertanam dalam diri mereka, yaitu keimanan. Ketika mereka ditanya apakah agama harus terlibat dalam urusan negara, 47% responden menjawab harus dan penting.

Hubungan agama (Islam) dan negara di Indonesia mengalami fase pasang surut. Pada saat proses pendirian negara, para pemimpin agama dan politik berdampingan secara harmoni, sehingga terbentuklah negara Republik Indonesia yang mandiri dari pemerintah kolonial Belanda. Pada masa Orde Lama terjadi keretakan hubungan antara para pemimpin agama dan politik, sehingga terjadi kerenggangan hubungan antara agama dan negara. Hubungan yang antagonis antara agama dan negara mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, ketika negara mengesampingkan peran agama di ranah publik dan politik. Sementara itu, hubungan agama menjadi harmonis kembali pada masa-masa akhir kekuatan Orde Baru. Agama dan negara saling tukar kepentingan untuk saling menguatkan, dan berjalan sampai masa Orde Reformasi. Pascaorde Refomasi terjadi hubungan yang menegangkan antara agama dan negara, terutama ketika terjadi pembelahan keberpihakan secara politik.

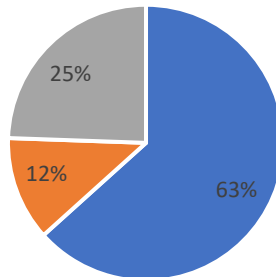
Para responden memiliki penilaian masing-masing terhadap pola hubungan agama dan negara di Indonesia. Secara umum, para responden menilai terjadi hubungan harmonis antara agama dan negara di Indonesia saat ini. Terdapat responden yang menilai bahwa hubungan

agama dan negara di Indonesia saat ini diwarnai konflik, sehingga berada dalam suasana bersitegang.



Para responden menilai bahwa hubungan agama dan negara perlu dipulihkan untuk saling menguatkan. Negara membutuhkan bantuan agama untuk memperkuat program dan aturannya, sedangkan agama membutuhkan negara untuk memperkuat eksistensinya. Para responden menilai bahwa agama dapat mendampingi negara dalam percepatan program pembangunan dan program lainnya. Kekalutan dan kekusutan hubungan antara agama dan negara berefek terhadap banyak hal dalam bernegara. Akibat hubungan agama dan negara yang tidak harmoni banyak program pembangunan yang terbengkalai, bahkan berakibat pada keberlangsungan negara. Banyak negara yang mengalami kehancuran akibat hubungan agama dan negara yang tidak harmoni, diwarnai konflik atas nama agama dan perdebatan pada ideologi negara. Dalam banyak hal agama memiliki peran yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia, menyangkut moral, mental, pendidikan, keahlian, dan juga dalam membangun persepsi masyarakat pada pemerintah.

### Pemulihan Hubungan Agama-Negara

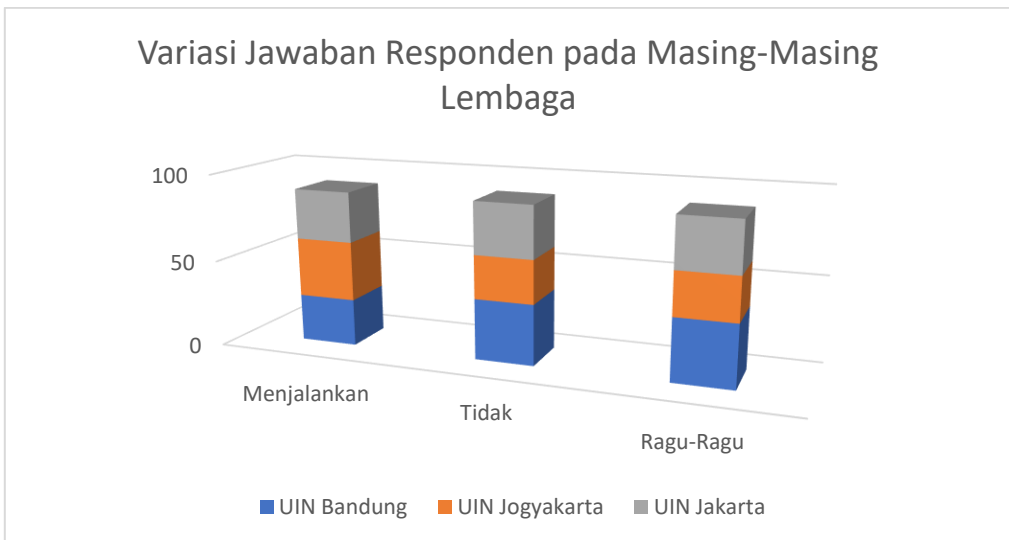
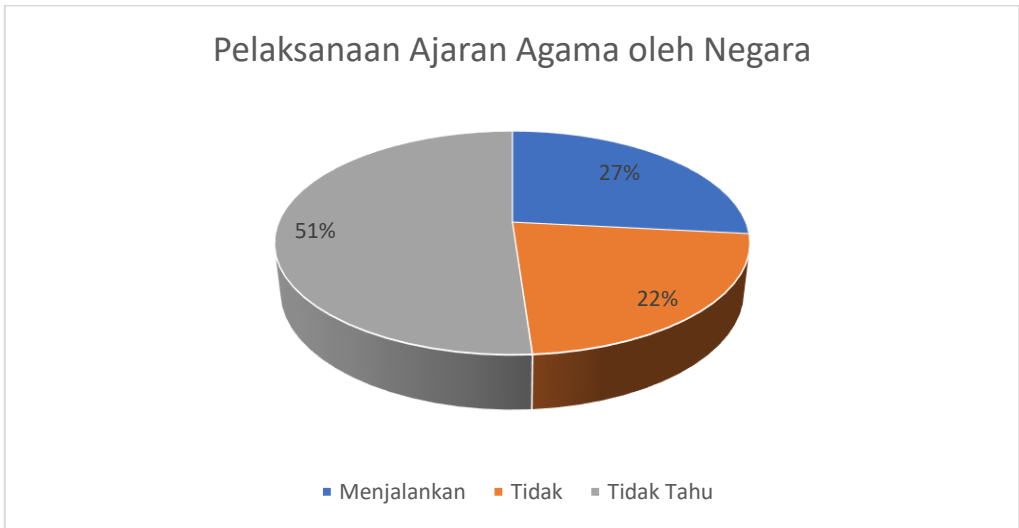


■ Perlu ■ Tidak Perlu ■ Tidak Tahu

Mayoritas responden menghendaki agar negara dan agama melakukan pemulihan hubungan harmoni. Para responden yang menjawab tidak perlu dikarenakan mereka menilai bahwa agama selalu menjadi korban kepentingan negara. Data ini dapat digunakan untuk memotret tentang besaran masyarakat yang memosisikan negara sebagai lawan agama. Pandangan para responden tersebut berkait juga dengan pandangan mereka terhadap pemerintahan yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama secara resmi.

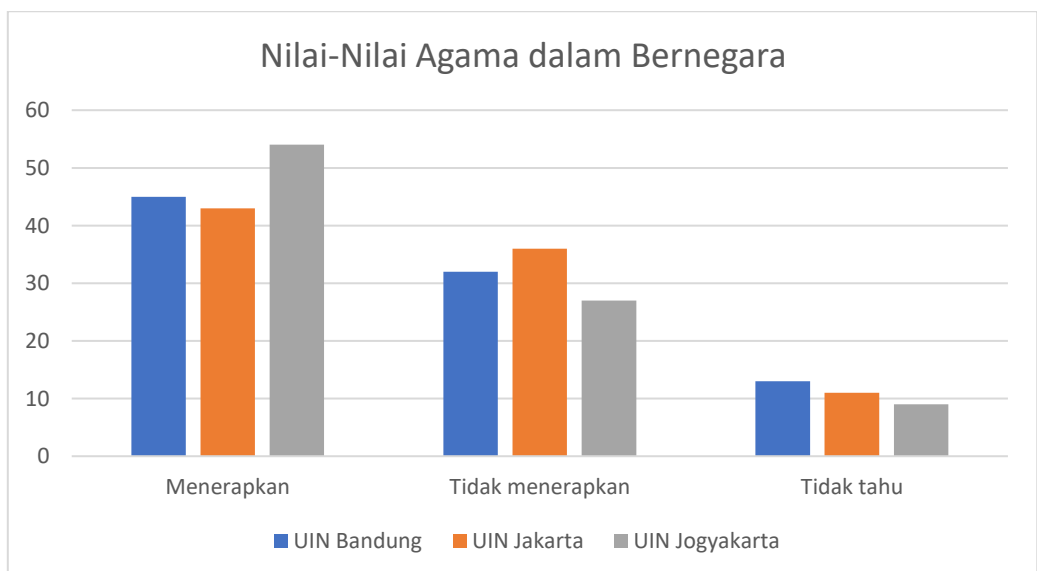
Ketika para responden ditanya apakah negara telah menjalankan ajaran agama dalam menjalankan pemerintahannya, terjadi keragaman jawaban. Secara umum responden dari Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, dan Ilmu Politik memberikan jawaban ragu-ragu, sementara itu yang menjawab yakin telah melaksanakan lebih tinggi dibanding yang menjawab tidak melaksanakan. Kecenderungan jawaban ini terjadi secara merata di UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Yogyakarta. Walaupun begitu, terjadi variasi data dalam jawaban *telah*

*melaksanakan*. Para responden di UIN Bandung yang menjawab *telah melaksanakan* lebih kecil dibanding dengan responden di UIN Yogyakarta, sementara itu tidak terpaut jauh dengan responden dari UIN Jakarta.



Data pada gambar di atas memotret variasi karakteristik responden di masing-masing UIN dalam hal sikap bernegara. Responden UIN Bandung dan Jakarta tidak terlalu memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal sikap dan karakter bernegara, cenderung militan. Adapun sikap dan karakter bernegara mahasiswa UIN Jogjakarta cenderung moderat dalam sikap bernegara.

Para responden memiliki perbedaan pandangan yang mendasar dalam hal pelaksanaan ajaran agama dalam bernegara. Para responden di UIN Jakarta dan UIN Bandung membedakan antara nilai dan ajaran. Para responden bersepakat bahwa telah banyak nilai agama yang dilaksanakan oleh negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Lain halnya terkait ajaran agama. Para responden berbeda pandangan dalam hal pengertian dan penerapan, yang menurut para pembedanya adalah kaidah-kaidah literal dari agama, seperti sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik.





Dari data yang ditemukan terkait penerapan ajaran agama, para responden dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) *literalism*, (2) *substansialism*. Kelompok literalis menganggap bahwa intervensi sosial oleh agama tidak cukup hanya dalam bentuk nilai yang diinjeksikan, melainkan harus secara literal yang menarik semua unsur sistem suatu agama, yaitu kultur, struktur, dan materi.<sup>25</sup> Ogland dan Bartkowski mengidentifikasi mereka dengan sebutan kelompok konservatif.<sup>26</sup> Kelompok literalis menghendaki ajaran agama diterapkan secara literal dalam banyak aspek sosial, seperti politik, pendidikan, dan terutama dalam pelaksanaan keagamaan.<sup>27</sup> Adapun kelompok substansialis adalah mereka yang menawarkan konsep intervensi agama bagi kehidupan sosial dalam bentuk peninjeksian nilai-nilai universalnya (*universal value*), sekalipun secara kultur, struktur, dan materi tidak ditampilkan secara persis. Kelompok substansialis menganggap bahwa ajaran agama secara literal memiliki keterbatasan waktu dan ruang, sehingga ada barikade tertentu yang menghalangi intervensi agama secara persis terhadap kehidupan sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Cassese, E. C., & Holman, M. R. (2016). Religious beliefs, gender consciousness, and women's political participation. *Sex Roles*, 75(9-10), 514-527. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s11199-016-0635-9>

<sup>26</sup> Ogland, C. P., & Bartkowski, J. P. (2014). Biblical literalism and sexual morality in comparative perspective: Testing the transposability of a conservative religious schema. *Sociology of Religion*, 75(1), 3-1. doi:<http://dx.doi.org/10.1093/socrel/srt056>

<sup>27</sup> Franzen, A. B., & Griebel, J. (2013). Understanding a cultural identity: The confluence of education, politics, and religion within the american concept of biblical literalism. *Sociology of Religion*, 74(4), 521-1. doi:<http://dx.doi.org/10.1093/socrel/srt051>

<sup>28</sup> Galambos, C. (2009). POLITICAL TOLERANCE, SOCIAL WORK VALUES, AND SOCIAL WORK EDUCATION. *Journal of Social Work Education*, 45(3), 343-347. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/209788501?accountid=38628>

Berdasarkan data yang ditemukan, secara gender para responden dari kalangan perempuan lebih berpihak pada literalism atau konservatif dibanding para responden pria lebih yang lebih berpihak pada substansialism. Beberapa peneliti menemukan hal yang hampir sama dalam hal ini.<sup>29</sup> Kecenderungan ini terjadi secara merata di kalangan para responden di UIN Bandung, UIN Jogjakarta, dan UIN Bandung.

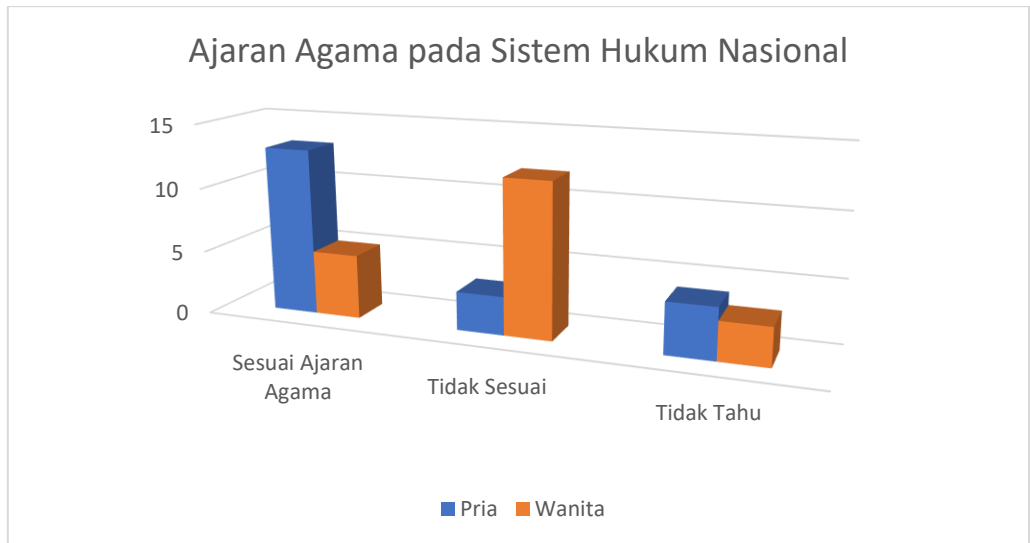
Beberapa pertanyaan penelitian disampaikan kepada para responden, di antaranya adalah tentang sikap mereka pada sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian ini mencoba memilih 40 responden yang dibagi dua berdasarkan jenis kelamin. Kepada mereka diberikan pertanyaan yang sama mengenai sistem hukum nasional yang sekarang diterapkan oleh negara Indonesia dihubungkan dengan ajaran agama Islam.

Jumlah responden dari kalangan pria lebih banyak memberikan jawaban bahwa sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga bagi mereka sistem hukum agama telah terlaksanakan dalam sistem hukum nasional yang dijalankan. Sedangkan, para responden wanita lebih banyak menjawab bahwa sistem hukum nasional Indonesia tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, bukan sistem hukum yang telah sesuai dengan syariat. Responden wanita lebih banyak menyatakan tidak setuju dengan

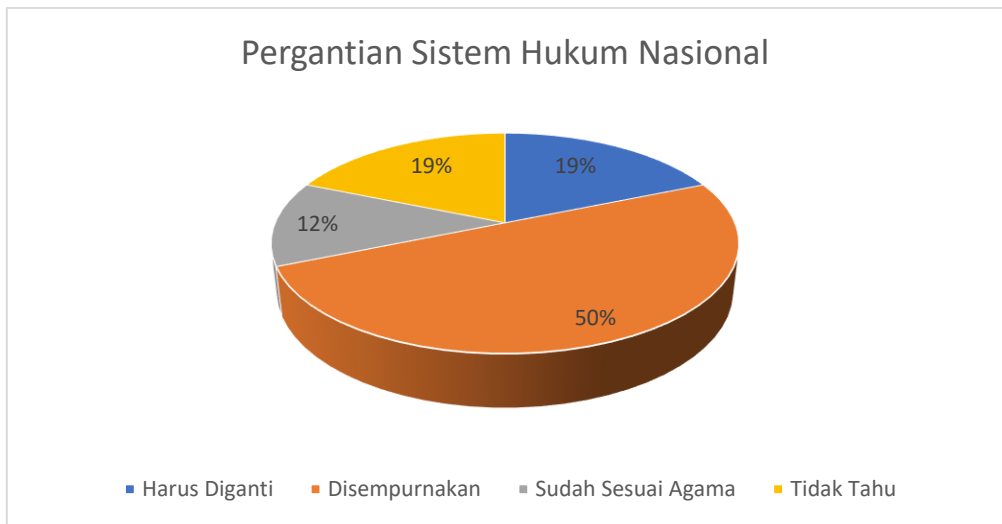
---

<sup>29</sup> Abbott, D. M., Harris, J. E., & Mollen, D. (2016). The impact of religious commitment on women's sexual self-esteem. *Sexuality & Culture*, 20(4), 1063-1082. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s12119-016-9374-x>

beberapa pemberian hukuman yang diberikan oleh negara untuk bentuk-bentuk pelanggaran aturan yang dilakukan oleh masyarakat.



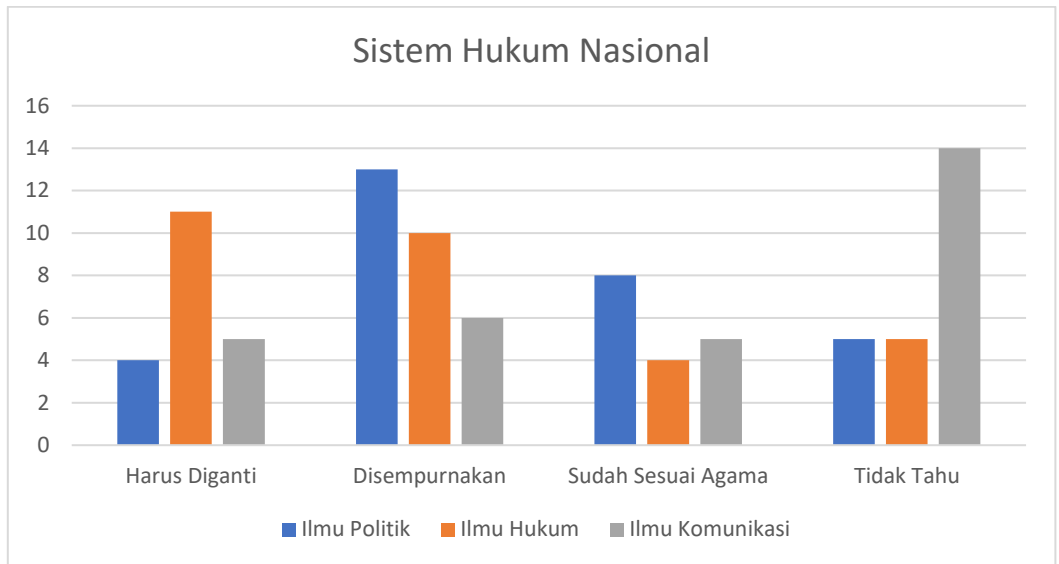
Ketika para responden ditanya apakah mereka menginginkan sistem hukum lain untuk menggantikan sistem hukum nasional, jawaban sangat beragam. Beberapa responden ada yang menjawab tidak tahu, ada juga yang menjawab harus diganti total oleh sistem hukum Islam, dan kebanyakan responden menjawab untuk disempurnakan.



Berdasarkan data yang tersaji di atas, secara umum para responden masih ragu dalam bersikap, sehingga mereka lebih mengambil jawaban mengambang, yaitu disempurnakan. Apabila digabung dengan prosentase responden yang menjawab tidak tahu, semakin tampak bahwa mayoritas responden masih ragu untuk bersikap. Adapun responden yang yakin bahwa sistem hukum nasional Indonesia sudah sesuai hukum agama hanya mencapai 12%, di bawah jumlah yang masih ragu (tidak tahu).

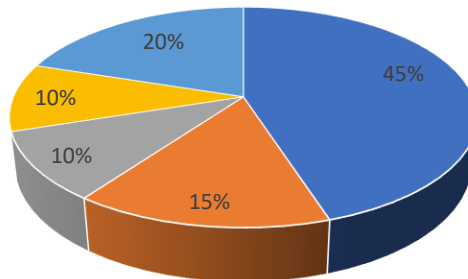
Terjadi kecenderungan yang sama pada jawaban para responden di UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Jogjakarta. Tidak terdapat perbedaan data yang mencolok dalam hal ini di tiga universitas tersebut, walaupun pada segmen latar belakang keilmuan responden (mahasiswa) terdapat perbedaan yang cukup kontras, terutama antara responden dari kalangan Ilmu Hukum dengan responden kalangan Ilmu Politik. Sementara itu, prosentase jawaban para responden dari kalangan

mahasiswa Ilmu Komunikasi cenderung merata, sekalipun jawaban tidak tahu lebih tinggi dibanding dengan jawaban lainnya.



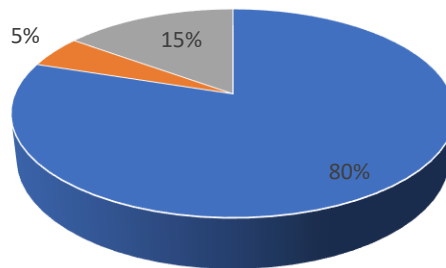
Ketika ditanyakan kepada dua puluh (20) responden yang menjawab *harus diganti* tentang hukum penggantinya, para responden berbeda jawaban. Kebanyakan responden menjawab hukum yang bersumber dari agama sebagai penggantinya, diikuti jumlah responden yang menjawab sistem hukum nasional hasil kesepakatan, dan beberapa responden menjawab hukum lainnya. Ketika para responden ditanya apakah hukum agama akan dapat menciptakan keadilan, mayoritas responden menjawab yakin akan bisa menciptakan, sedangkan responden lainnya menjawab tidak tahu.

### Sistem Hukum Pengganti



■ Hukum Agama (Islam) ■ Hukum Nasional ■ Hukum Adat ■ Hukum Lain ■ Tidak Tahu

### Hukum Agama dan Keadilan



■ Adil ■ Tidak ■ Tidak Tahu

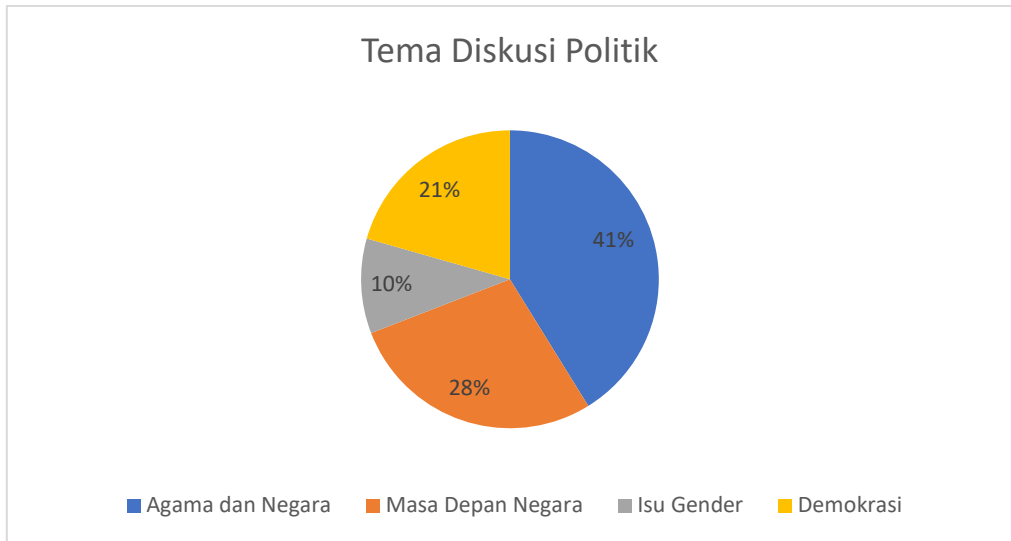
Mayoritas responden yakin bahwa sistem hukum agama akan menciptakan keadilan, karena diyakini berasal dari Tuhan. Responden yang menjawab *tidak akan adil* mendasarkan pandangannya pada berita kejadian di negara-negara yang menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum nasionalnya, yang masih menyisakan sejumlah persoalan sosial, seperti diskriminasi jender, kebebasan beragama, dan lain-lain. Sedangkan, responden yang menjawab tidak tahu dikarenakan mereka

mengaku tidak memahami secara mendalam kaidah-kaidah hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan publik, sehingga ragu apakah akan menciptakan keadilan atau tidak, karena tidak tahu persis.

#### **G. Intensitas Diskusi Politik**

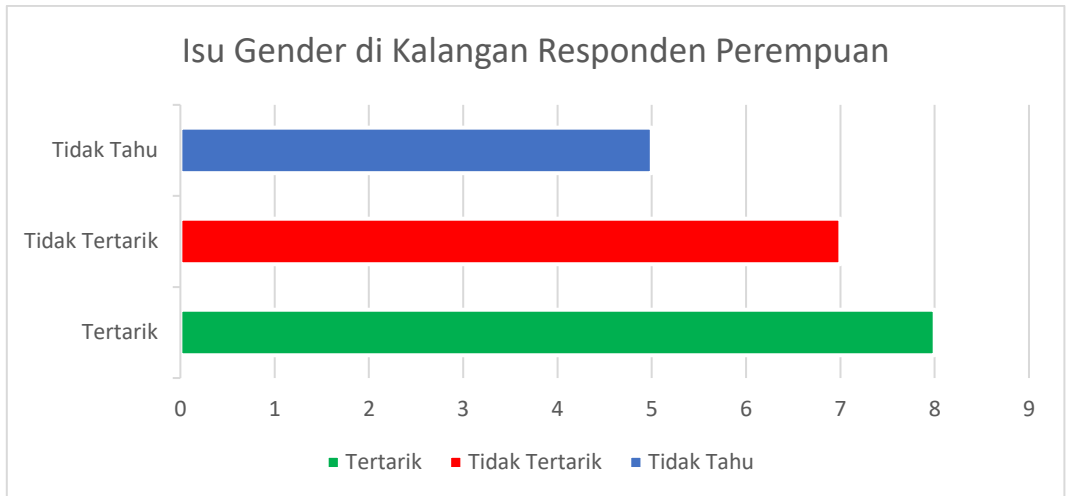
Diskusi politik tidak merupakan kegiatan yang sangat dominan di kalangan para responden, baik di kalangan mahasiswa Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, termasuk Ilmu Politik. Prosentase mereka yang biasa (sering) melakukan diskusi dengan para koleganya tidak mencolok, yaitu hanya mencapai 35%. Sementara itu, 40% menjawab bahwa mereka jarang melakukan diskusi tentang politik dan 25% tidak pernah sama sekali.

Ketika para responden ditanya tentang empat tema diskusi politik, mayoritas menjawab bahwa tema yang paling menarik bagi mereka adalah hubungan agama dan negara, dan secara berurutan masa depan negara, demokrasi, dan isu gender. Masa depan negara termasuk yang banyak diskusikan oleh para responden, karena menyangkut masa depan mereka. Sementara itu, responden paling minim mendiskusikan tentang isu gender.

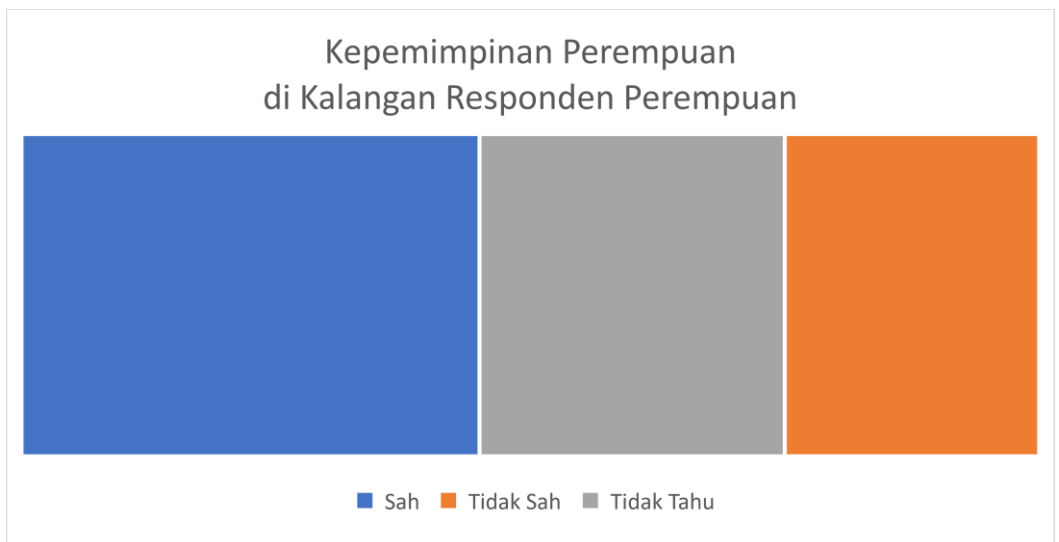


Isu gender menjadi tema yang kurang diminati oleh para responden, dikarenakan bagi mereka isu gender di Indonesia sudah tidak menjadi masalah yang krusial. Keterbukaan aktivitas ruang publik bagi semua jenis kelamin terbuka, sehingga dianggap kurang relevan membicarakan isu gender. Bahkan, sejumlah responden dari kalangan perempuan menjawab tidak tertarik membicarakan isu gender, dengan mendasarkan pada ajaran agama, sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi mereka lebih berpengaruh daripada jenis kelamin.



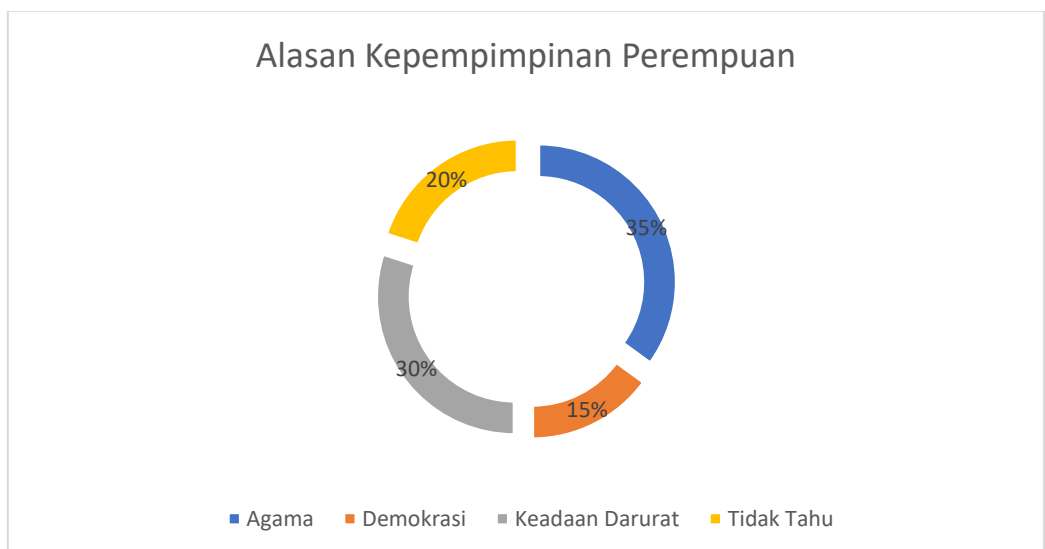


Salah satu isu gender dalam politik yang ditanyakan kepada para responden perempuan adalah terkait dengan pemimpin negara berjenis kelamin perempuan. Jawaban para responden beragam antara yang menyatakan sah, tidak sah, dan tidak tahu.



Berdasarkan gambar di atas, secara umum para responden setuju (menyatakan sah) terhadap kepemimpinan perempuan dengan catatan bahwa mereka lebih berkualitas dari kalangan laki-laki. Alasan

para responden beragam dalam menerima dan menolak perempuan sebagai pemimpin negara. Beberapa responden menyatakan sah seorang perempuan menjadi pemimpin negara dalam keadaan darurat kualitas laki-laki. Sebagian responden mendasarkan keabsahan perempuan untuk menjadi pemimpin negara kepada prinsip kebebasan dalam demokrasi, yang memberikan kebebasan luas kepada semua pihak untuk mengakses jabatan-jabatan publik tanpa batasan jenis kelamin.



Isu kepemimpinan politik perempuan dalam kajian ketatanegaraan Islam merupakan tema hukum yang diperbincangkan oleh para ahli di antara yang pro dan kontra. Dan beberapa dekade terakhir, gerakan perluasan hak politik perempuan menjadi gejala di banyak kawasan, terutama negara-negara yang secara budaya meempatkan perempuan pada posisi kelas dua dalam kehidupan

sosialnya.<sup>30</sup> Secara kultural, kaum perempuan mendapatkan hambatan hampir di banyak sistem kebudayaan untuk mengambalalih peran-peran sosial kaum laki-laki. Di negara-negara Eropa pun demikian, masih terdapat hambatan kultural yang membentuk barikade sosial bagi kaum perempuan untuk mengambil peran dominan dalam sistem politik. Kemunculan revolusi gender di tahun 1960-an, berbarengan dengan revolusi seksual yang dikampanyekan oleh kaum feminis, tidak cukup kuat untuk mendongkrak hambatan kultural peran sosial kaum perempuan, lebih-lebih di negara yang didominasi oleh doktrin keagamaan.<sup>31</sup> Walaupun begitu, Indonesia melakukan terobosan maju melalui pemberian afirmasi (*affirmative action*) bagi perempuan melalui undang-undang (UU Nomor 10 Tahun 2008) yang dibuatnya. Perempuan diberikan hak istimewa politik dalam bentuk kesempatan terpatok untuk menduduki jabatan legislatif dalam proses pemilu dengan cara penempatan mereka pada nomor urut calon legislatif yang potensial untuk memenangkan persaingan politik.

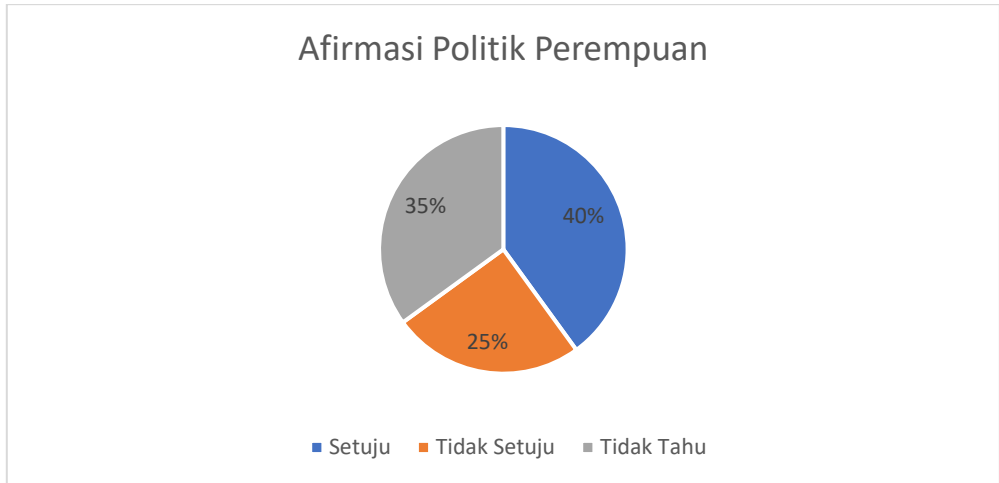
Pada saat responden diajak untuk berdiskusi mengenai pemberian hak istimewa politik bagi kalangan perempuan, beberapa dari mereka ada yang menyatakan setuju dan juga ada yang menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan para responden terhadap pemberian hak istimewa politik dalam bentuk afirmasi, karena proses politik adalah

---

<sup>30</sup> Rizzo, H., Meyer, K., & Ali, Y. (2002). Women's Political Rights: Islam, Status and Networks in Kuwait. *Sociology*, 36(3), 639–662. <https://doi.org/10.1177/0038038502036003008>

<sup>31</sup> Ija Suntana, (2010). *Kapita Selektta Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 47.

sebuah aktivitas kompetisi, tanpa harus menghubungkan dengan alasan gender.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam mempelajari politik, para responden memiliki sikap yang beragam. Secara mayoritas, para responden dari kalangan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi menyatakan terlibat dalam mempelajari ilmu politik. Mereka mengaku tertarik dalam mempelajari ilmu politik. Sedangkan, para responden dari kalangan Ilmu Hukum menyatakan tidak terlibat (tidak menjiwai) dalam mempelajari ilmu politik, sehingga mereka tidak tertarik secara penuh dalam mempelajarinya. Bagi para responden dari kalangan Ilmu Hukum ilmu politik merupakan pengetahuan asing (*unfriendly knowledge*), dalam arti tidak diminati, sedangkan bagi para responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Politik dan Komunikasi ilmu politik merupakan pengetahuan ramah (*friendly knowledge*).
2. Terjadi perbedaan dampak yang berbeda di kalangan para responden terkait pembelajaran ilmu politik, yang dikategori kepada dua bentuk, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pertanda ketertarikan pada politik yang terjadi di kalangan para responden. Sedangkan, dampak negatif adalah pertanda ketidaktertarikan para responden terhadap politik secara realitas di kalangan para responden. Responden dari kalangan mahasiswa Ilmu politik dan Ilmu Komunikasi terdampak positif dari pembelajaran ilmu politik, sedangkan responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum terdampak negatif dari pembelajaran ilmu politik. Dimensi-dimensi politik persepsi secara negatif oleh para responden kalangan Ilmu Hukum, yang berkebalikan dengan para responden dari kalangan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi.

3. Dampak negatif pelajaran politik bagi responden dari kalangan mahasiswa Ilmu Hukum terkait dengan dua hal, yaitu (1) Ilmu hukum yang mereka pelajari selalu berbicara tentang apa yang seharusnya, sedangkan politik secara realitas menampilkan apa yang terjadi. Ilmu hukum, yang bersifat normatif-legalistik, membentuk karakter normatif pada pola pandang para responden dari kalangan Ilmu Hukum, (2) Apa yang terjadi dalam keseharian politik, berupa penyimpangan, membentuk pola pandang *underestimate* terhadap politik karena menyimpan potensi keburukan. Lain halnya bagi kalangan responden dari mahasiswa Ilmu Politik dan Komunikasi yang memandang optimis pada politik. Para responden dari dua kelompok

yang berlatar berbeda tersebut memandang ilmu politik sebagai pengetahuan yang netral, kebalikan dari kalangan responden Ilmu Hukum yang memandang ilmu politik sebagai pengetahuan berwarna mental tertentu.

## B. Rekomendasi

Beberapa kesimpulan sebagai mana tertuang di atas memerlukan rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Para responden yang menyatakan terlibat (menjiwai) dalam mempelajari ilmu politik perlu penguatan keberpihakan pada ilmu politik. Sedangkan, para responden yang menyatakan tidak terlibat dalam mempelajari ilmu politik perlu pemahaman mendasar tentang politik sehingga mereka tertarik secara penuh dalam mempelajarinya.
2. Persepsi para responden yang terdampak negatif dengan politik perlu dikenalkan pada persepsi netral sebuah pengetahuan, yaitu pemahaman bahwa pada dasarnya pengetahuan bersifat netral, bebas dari warna mental apapun. Sehubungan dengan itu, sebuah pengetahuan tidak bisa dinilai oleh faktor eksternal, melainkan hanya harus dinilai oleh faktor-faktor ilmiah internal. Salah benar suatu pengetahuan hanya diukur oleh validitas akademiknya.
3. Terdapat perbedaan karakter ilmu dari dua sistem pengetahuan, Hukum dan Politik, yang mesti dipahami. Ilmu politik tidak berbicara tentang apa yang seharusnya, melainkan apa yang terjadi. Sementara itu, sistem

pengetahuan ilmu hukum selalu berbicara apa yang seharusnya. Dua sistem pengetahuan tersebut seharusnya digabungkan untuk menemukan titik temu kesamaan dalam memandang sebuah realitas sosial yang bernama aktivitas politik. Hukum harus mengawal politik, dan politik membuka ruang bagi hukum untuk menafsirkan dirinya, sehingga dapat memahami realitas yang terjadi dengan menimbang sisi kemaslahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, D. M., Harris, J. E., & Mollen, D. (2016). The impact of religious commitment on women's sexual self-esteem. *Sexuality & Culture*, 20(4), 1063-1082. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s12119-016-9374-x>
- Cassese, E. C., & Holman, M. R. (2016). Religious beliefs, gender consciousness, and women's political participation. *Sex Roles*, 75(9-10), 514-527. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s11199-016-0635-9>
- Ceresola, R. (2016). *Political corruption and political engagement: A multilevel analysis investigating the effect of political corruption prosecutions on voting and government trust in the united states* (Order No. 10163430). Available from Sociology Database. (1830773693). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1830773693?accountid=38628>
- Franzen, A. B., & Griebel, J. (2013). Understanding a cultural identity: The confluence of education, politics, and religion within the american concept of biblical literalism. *Sociology of Religion*, 74(4), 521-1. doi:<http://dx.doi.org/10.1093/socrel/srt051>
- Frohock, F. M. (1997). Conceptions of Persons. *Social Theory and Practice*, 23(1), 129-158. doi:<http://dx.doi.org/10.5840/soctheorpract19972317>
- Galambos, C. (2009). POLITICAL TOLERANCE, SOCIAL WORK VALUES, AND SOCIAL WORK EDUCATION. *Journal of Social Work Education*, 45(3), 343-347. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/209788501?accountid=38628>

- Gustafsson, B. (1974). The Role of Religion in Modern Sweden: Religion as a Reference System Religion as a System Of Adaptation Table 1 Religion as an Integrative System Religion as an Affirmative System Religion as System of Innovation from Folk Religion to Personal Religiosity Discussion and Conclusion Table 2 Table 3. *The American Behavioral Scientist (Pre-1986)*, 17(6), 827. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/194650908?accountid=38628>
- Ija Suntana, (2010). *Kapita Selektta Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Ilc, B. V. (2017). Racism and the Crises of Political Representation in the American Republic - from its Constitution to the Trump Phenomenon. *Teorija in Praksa*, 54(1), 17-37,187. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1902029424?accountid=38628>
- Jamal Al-Thalaqani, *Audzu min al-Syaithan wa al-Siyasah*, alnoor.se./article.aspx?id=47967, diakses 10 Agustus 2019.
- Lacayo, V. (2013). *Communicating complexity: A complexity science approach to communication for social change* (Order No. 3671428). Available from Biological Science Collection. (1647184772). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1647184772?accountid=38628>
- Montague, P. (2004). Religious reasons and political debate. *Social Theory and Practice*, 30(3), 327-349. doi:<http://dx.doi.org/10.5840/soctheorpract200430316>
- Noble, M. D. (2016). *Illuminating democracy: Trends, predictors, and outcomes of liberal democracy 1972-2013* (Order No. 10245531). Available from Sociology Database. (1855945179). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1855945179?accountid=38628>

- Ogland, C. P., & Bartkowski, J. P. (2014). Biblical literalism and sexual morality in comparative perspective: Testing the transposability of a conservative religious schema. *Sociology of Religion*, 75(1), 3-1. doi:<http://dx.doi.org/10.1093/socrel/srt056>
- Park, J., & Stangarone, T. (2019). Trump's america first policy in global and historical perspectives: Implications for US–East asian trade. *Asian Perspective*, 43(1), 1-34. doi:<http://dx.doi.org/10.1353/apr.2019.0000>
- Rizzo, H., Meyer, K., & Ali, Y. (2002). Women's Political Rights: Islam, Status and Networks in Kuwait. *Sociology*, 36(3), 639–662. <https://doi.org/10.1177/0038038502036003008>
- Shukri, S. F. M., & Hossain, I. (2017). Political discourse and islam: Role of rhetoric in turkey. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 42(2), 157-179. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1922871897?accountid=38628>
- Silver, A. (2018). US-china trade war rattles labs. *Nature*, 558(7711), 494-495. doi:<http://dx.doi.org/10.1038/d41586-018-05521-2>
- Soukup, P. A., S.J. (2014). Political Communication. *Communication Research Trends*, 33(2), 3-43. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1550514483?accountid=38628>
- Tsyrendorzhieva, D., & Bagaeva, K. (2016). *State-religious relations in modern russian society*. Les Ulis: EDP Sciences. doi:<http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162801103>
- Yeger, H. (2015). The Evolution of Human Communication. *Journal of Cell Communication and Signaling*, 9(3), 289-290. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s12079-015-0286-6>

